

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029



**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANDUNG**



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS

OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

NOMOR HK.02.02.8A.12.25.276 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2025-2029.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra BBPOM di Bandung Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra BBPOM di Bandung Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, adalah dokumen perencanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan POM Tahun 2025-2029
- Ketiga : Renstra BBPOM di Bandung Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud diktum kesatu memuat:
- a. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - c. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - d. Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Desember 2025
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDUNG,



I MADE BAGUS GERAMETTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025-2029 sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029, telah selesai disusun dengan baik, dengan tujuan untuk memberi arah yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Jawa Barat, sesuai Visi yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis BBPOM di Bandung Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan BBPOM di Bandung yang selaras dengan Rencana Strategis Badan POM Tahun 2025-2029 dan RPJMN tahun 2025–2029, serta sekaligus juga menjadi instrumen pengukuran kinerja BBPOM di Bandung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan Tahun 2029.

Dengan Renstra ini, diharapkan dapat memperkuat kontribusi BBPOM di Bandung dalam meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan masyarakat, khususnya untuk masyarakat Jawa Barat. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Renstra BBPOM di Bandung tahun 2025-2029 ini.

Bandung, 5 Desember 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung (BBPOM di Bandung) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), yang berada di Jawa Barat untuk mengemban tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengawasan Obat dan Makanan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan POM nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BBPOM di Bandung menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

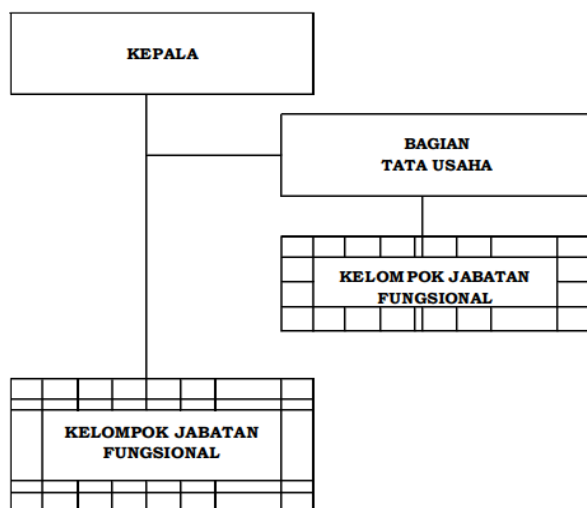
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sebagaimana Peraturan Badan POM nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja BBPOM di Bandung meliputi 5 Kota dan 14 Kabupaten di wilayah Jawa Barat, yaitu : Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023, adalah sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Bandung



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi demografi yang cukup dinamis dengan luas wilayah berupa daratan seluas 35.377,76 km². dan Kota Bandung sebagai ibukota provinsi. Jawa Barat terbagi menjadi 27 wilayah yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota, dengan 627 Kecamatan dan 5.957 Desa/Kelurahan di Jawa Barat terdiri dari 2.672 urban dan 3.285 rural.

Jawa Barat memiliki populasi sekitar 49,8 juta jiwa (BPS, 2023), dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,32% yang berasal dari kelahiran yang tinggi dan migrasi dari daerah lain, terutama pada daerah-daerah urban. Hal ini menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu pusat ekonomi dan sosial di Indonesia. Berdasarkan data BPS Tahun 2022, ada sebanyak 266.402 Industri Mikro dan Kecil yang berusaha di bidang Farmasi dan Pangan Olahan, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1.1

JUMLAH INDUSTRI OBAT DAN MAKANAN DI JAWA BARAT

No	Klasifikasi Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja
1	Industri makanan	250.155	556.360
2	Industri minuman	15.495	34.594
3	Industri Farmasi	752	1.501
Jumlah		266.402	592.455

Dengan kondisi ekonomi dan sosial Jawa Barat yang sangat besar dan dinamis tersebut, membuat BBPOM di Bandung dituntut untuk dapat memberikan peran yang lebih dalam melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara efektif dan efisien memberikan perlindungan kepada masyarakat Jawa Barat.

Rencana Strategis BBPOM di Bandung untuk periode 2025-2029 disusun tidak hanya untuk mengantisipasi resiko dan perubahan eksternal berupa tantangan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tapi juga sebagai pemberi arah yang jelas dan memastikan sumber daya yang digunakan secara efektif untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal yang dapat melindungi masyarakat, sekaligus juga menumbuhkan industri farmasi dan pangan olahan yang berdaya



saing, dan tetap memastikan masyarakat Jawa Barat memiliki akses terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

Capaian Kinerja BBPOM di Bandung Tahun 2020 – 2024

Pengukuran kinerja BBPOM di Bandung mengacu kepada ketercapaian Sasaran Kegiatan, yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024. BBPOM di Bandung memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 34 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dengan penjelasan sebagai berikut :

Penyusunan Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandung tersebut menggunakan pendekatan Balance Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3(tiga) perspektif, yaitu stakeholder perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Nilai kinerja BBPOM di Bandung berdasarkan perspektif adalah sebagai berikut :

TABEL 1.2
NILAI KINERJA BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2020 - 2024

Perspektif	Sasaran Kegiatan		Nilai Capaian Sasaran Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective	1.	Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	104.42	99.81	104.11	106.03	101.16
	2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung	93.54	110.32	111.66	111.13	108.80
	3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	104.24	95.95	100.31	102.30	101.44
	Nilai Perspektif		100.73	102	105.36	106.48	103.80



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Persektif	Sasaran Kegiatan		Nilai Capaian Sasaran Kegiatan				
			2020	2021	2022	2023	2024
Internal Process Perspective	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	104.66	101.38	107.60	103.82	101.82
	5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	100.94	99.82	100.05	100.01	100
	6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	108.75	89.42	97.97	99.37	100
	7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	84.23	120	120	120	85.98
	Nilai Perspektif		99.65	103	106.40	105.80	96.95
Learning And Growth Perspective	8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	93.76	98.53	100.43	100.72	99.51
	9	Terwujudnya sdm BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	104.77	107.32	107.38	111	97.24
	10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	113.27	84.67	109.05	102.86	100.41
	11	Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel	105.50	100.01	95.22	92.34	114.51
		Nilai Perspektif	104.33	98	103.02	101.73	104.81
Nilai Kinerja UPT BBPOM di Bandung			101.57	101	104.93	104.67	101.85



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sesuai dengan Rencana Strategis BBPOM di Bandung periode Tahun 2020-2024, capaian kinerja BBPOM di Bandung diukur dengan 34 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam 11 Sasaran Kegiatan, yang tersusun dalam 3 perpektif. Capaian IKU dan sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

TABEL 1.3
DATA CAPAIAN BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2020 - 2024

Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung															
IKU 1 – Persentase obat yang memenuhi syarat	80,80	97,62	120.82	97	95.88	98.85	97.50	88.48	90.75	98	97.36	99.35	98.50	96.71	98.19
IKU 2 – Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	76.80	98.46	80	87.06	108.83	82	89.42	109.05	84	88.17	104.96	88.80	90.42	101.82
IKU 3 – Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	94.49	104.99	94	91.96	97.83	95.50	87.79	91.93	96	95,68	99,67	96.50	95.38	98.84
IKU 4 – Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	67.25	93.40	70	74.16	105.94	72	81.54	113.25	78	82.81	106.17	82.90	82.39	99.38
IKU 5 – Persentase pangan fortifikasi yang	-	-	-	70	61.33	87.62	72	83.23	115.60	78	97.6	125.13	90	96.80	107.56



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C
memenuhi syarat															
Capaian SK 1	104.42			99.81			104.11			106.03			101.16		
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung															
IKU 6 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	67.35	93.54	71	78.33	110.32	74	82.63	111.66	78	86.68	111.13	86.70	94.33	108.80
Capaian SK 2	93.54			110.32			111.66			111.13			108.80		
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung															
IKU 7 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	90.82	109.42	91.10	91.10	100	92.30	94.40	102.28	93.4	97.3	104.18	97.50	97.55	100.05
IKU 8 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	75.43	106.24	77.83	69.12	88.81	80.22	77.61	96.75	82.62	83.72	101.33	85.01	88.57	104.19
IKU 9 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	88.5	85.91	97.07	89.50	93.27	104.21	90.50	92.24	101.92	91	92.26	101.38	92.75	92.82	100.08



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C
Capaian SK 3	104.24			95.95			100.31			102.30			101.44		
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung															
IKU 10 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	96.85	111.32	96	92.1	95.94	97	97.71	100.73	98	100	102.04	99	99.56	100.57
IKU 11 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56.90	51.89	91.20	64	56.14	87.72	71	80.40	113.24	78	89.96	115.33	90	94.64	105.16
IKU 12 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	86.51	101.78	88	101.63	115.48	91	100	109.89	94	99.45	105.80	99.78	99.81	100.03
IKU 13 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	56.59	113.18	57	51.13	89.71	61	61.50	100.82	66	66.26	100.40	70	64.37	91.96
IKU 14 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	76	73.69	96.96	74	86.16	116.44	76	80.59	106.04	78	80.79	103.57	81	82.64	102.02



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C
memenuhi ketentuan															
IKU 15 - Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	3.7	4.2	113.51	4.35	4.48	102.99	4.45	4.67	104.94	4.4	4.14	94.09	4.45	4.90	110.11
IKU 16 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	77	90.48	117.50	79	83.33	105.48	100	100	100
IKU 17 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	99.50	104.74
Capaian SK 4	104.66			101.38			107.60			103.82			101.82		
SK5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung															
IKU 18 - . Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.43	90.70	103.74	92	91.35	99.29	93.80	93.98	100.19	95.7	95.75	100.05	96.6	96.6	100



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C
IKU 19 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16	100	42	42	100	76	76	100	112	112	100	138	138	100
IKU 20 - Jumlah desa pangan aman	6	6	100	19	19	100	28	28	100	37	37	100	45	45	100
IKU 21 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	2	100	8	8	100	13	13	100	18	18	100	21	21	100
Capaian SK 5	100.94			99.82			100.05			100.01			100		
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung															
IKU 22 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	89.75	109.45	100	87.03	87.03	100	96.02	96.02	100	99.07	99.07	100	100	100
IKU 23 - Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	88.60	108.05	100	91.82	91.82	100	99.91	99.91	100	99.66	99.66	100	100	100
Capaian SK 6	108.75			89.42			97.97			99.37			100		
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung															
IKU 24 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	62.33	84.23	65	83.40	128.32	67	86.64	120	70	84.88	121.26	80	68.78	85.95
Capaian SK 7	84.23			128.32			120			121.26			85.95		
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal															



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C
IKU 25 - Indeks RB BBPOM di Bandung	91	80.15	88.08	82.80	82.66	99.83	83.80	89.17	106.41	84.8	91.47	107.87	92.47	91.24	98.67
IKU 26 - Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	80.54	99.43	83	80.70	97.23	85.50	80.76	94.46	88	82.34	93.57	84	83.03	98.85
IKU 27 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.64	97.63	101.02
Capaian SK 8	93.76			98.53			100.43			100.72			99.61		
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal															
IKU 28 - Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	78.58	104.77	79	84.78	107.32	80	85.90	107.38	81	89.91	111	91.32	88.80	97.24
Capaian SK 9	104.77			107.32			107.38			111			97.24		
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan															
IKU 29 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	71.50	94.08	79	76.50	96.84	84	82.40	98.10	89	87	97.75	88.04	88.76	100.82
IKU 30 - Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1.51	2	132.45	2	1.45	72.50	2.25	2.88	120	2.8	2.88	102.86	3	3	100
Capaian SK 10	113.27			84.67			109.05			102.86			100		
SK11. Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel															
IKU 31 - . Nilai Kinerja Anggaran	93	95.14	102.30	95.10	90.78	95.46	95.30	90.74	95.22	95.6	88.28	92.34	91.01	94.89	104.26



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Kegiatan	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C	T	R	%C
BBPOM di Bandung															
IKU 32 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	92	100	108.70	95	99.33	104.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKU 33 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.28	95	126.20
IKU 34 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	95	113.09
IKU 35 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	73.90	123.17
Capaian SK 11	105.50			100.01			95.22			92.34			104.81		

Penjelasan secara rinci setiap Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan Kesatu (SK 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Bandung tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/ masyarakat.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Bandung merupakan suatu proses yang komprehensif yang diantaranya terdiri dari pertama, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Ke-dua pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-tiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Selama periode tahun 2020 - 2024, capaian kinerja Sasaran Kegiatan kesatu sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



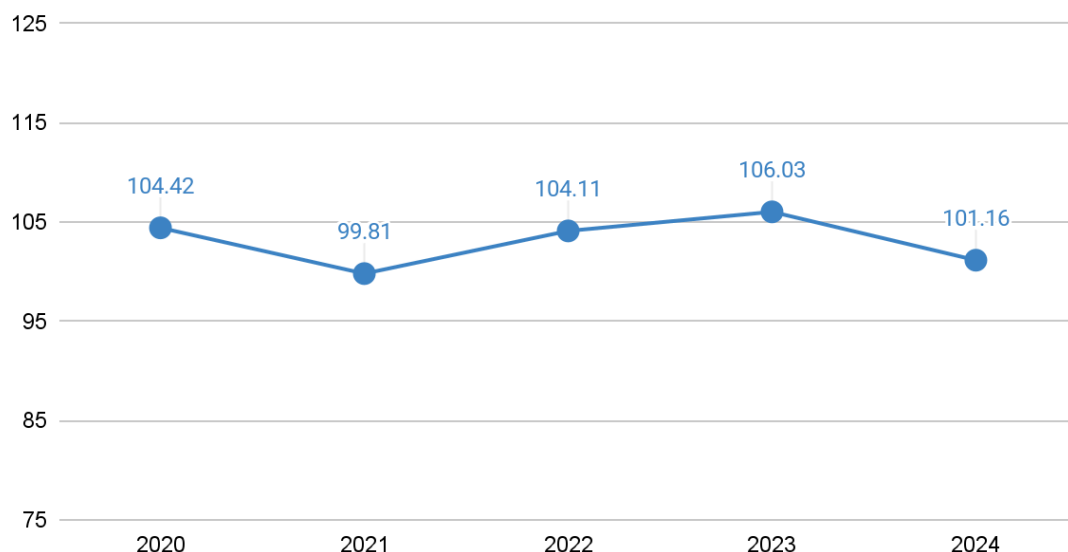
Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung



Sasaran kegiatan ini diukur dengan 5 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu : Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dan Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi Syarat. :

IKSK 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Capaian kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 120,82%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2022 sebesar 90,75%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKSK ini termasuk kedalam kategori “Menurun”. Hal ini disebabkan masih tingginya produk Obat Bahan Alam beredar yang tidak memenuhi syarat pengujian mikrobiologi.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



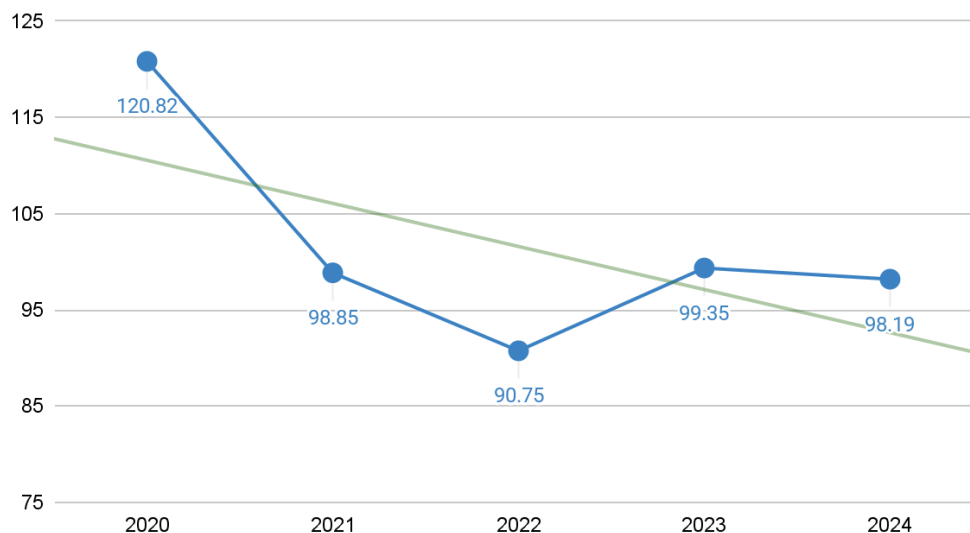
Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

IKSK 1. Persentase obat yang memenuhi syarat



IKSK 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Capaian kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 109.05%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2020 sebesar 98,46%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKS ini termasuk kedalam kategori “Meningkat”.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546

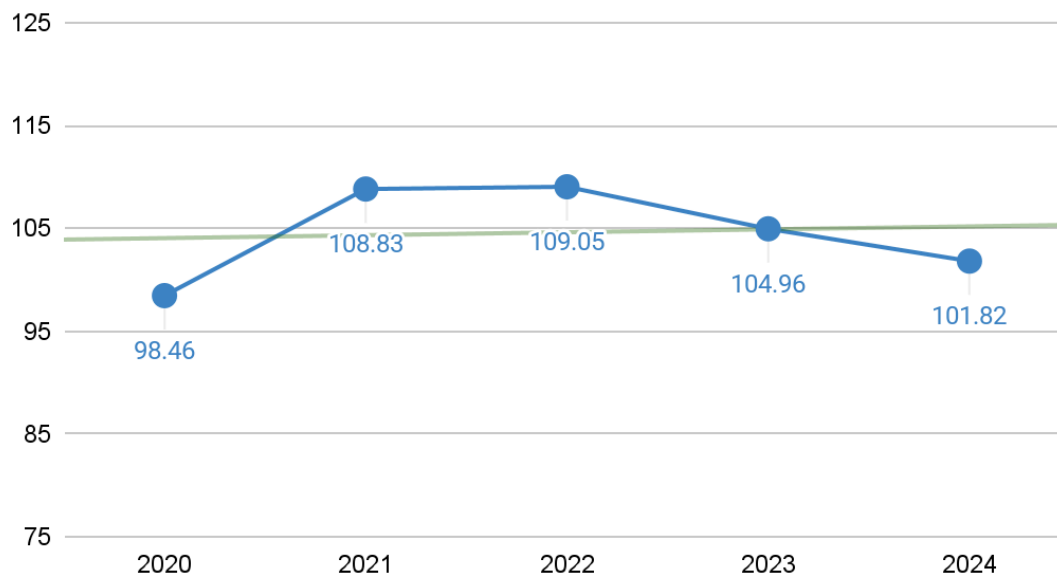


Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

IKSK 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat



IKSK 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Capaian kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 104.99%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2020 sebesar 91,93%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKSK ini termasuk kedalam kategori “Menurun”. Hal ini disebabkan masih tingginya produk Obat Bahan Alam beredar yang tidak memenuhi syarat pengujian mikrobiologi.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



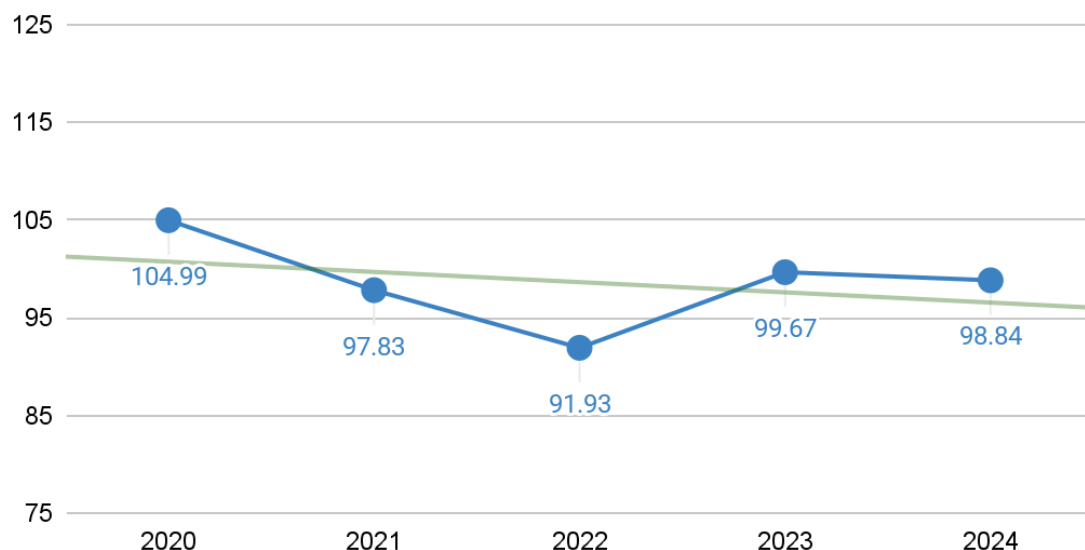
Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

IKSK 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



IKSK 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Capaian kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 113.25%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2020 sebesar 93,4%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKS K ini termasuk kedalam kategori “Meningkat”.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546

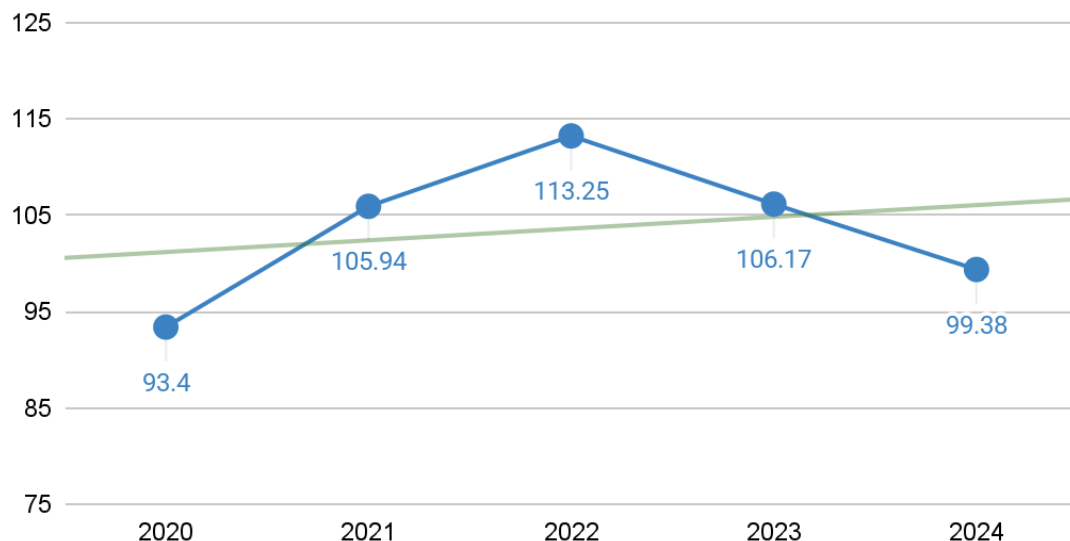


Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

IKSK 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



IKSK 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Capaian kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2023 sebesar 125,13%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2020 sebesar 87,62%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKS ini termasuk kedalam kategori "Meningkat".



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id

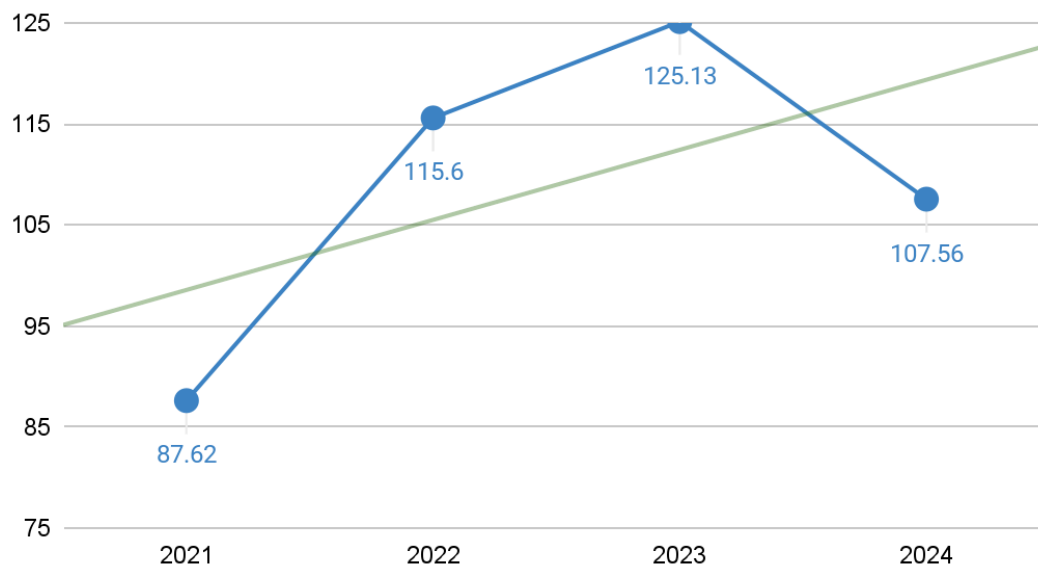


022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

IKSK 5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat



2. Sasaran Kegiatan Kedua (SK 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BBPOM di Bandung melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT.

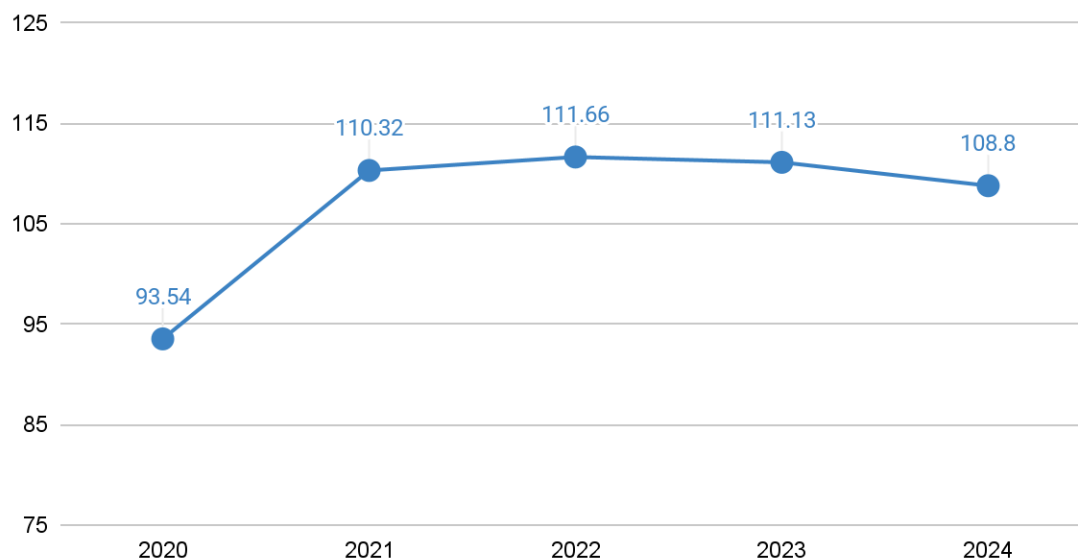
Selama periode tahun 2020 - 2024, capaian kinerja Sasaran Kegiatan kedua sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung



SK ini terdiri dari 1 IKSK yaitu Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan hasil sebagai berikut :

Capaian kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 111,66%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2020 sebesar 93,54%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKSK ini termasuk kedalam kategori "Meningkat".



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



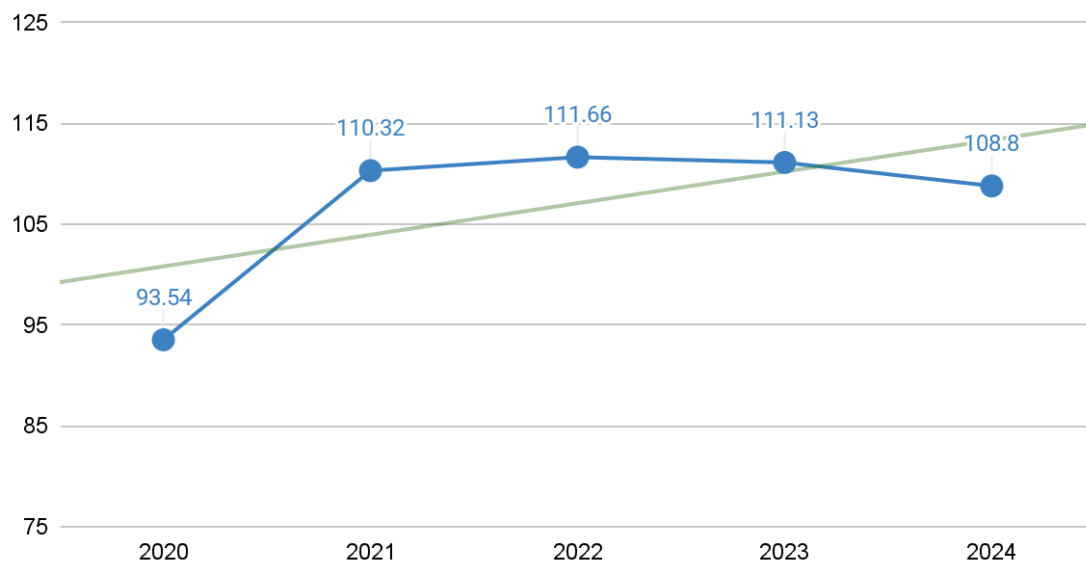
022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 6. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu



3. Sasaran Kegiatan Ketiga (SK 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung

BBPOM di Bandung berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BBPOM di Bandung, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BBPOM di Bandung bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Sasaran kegiatan ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dan Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.

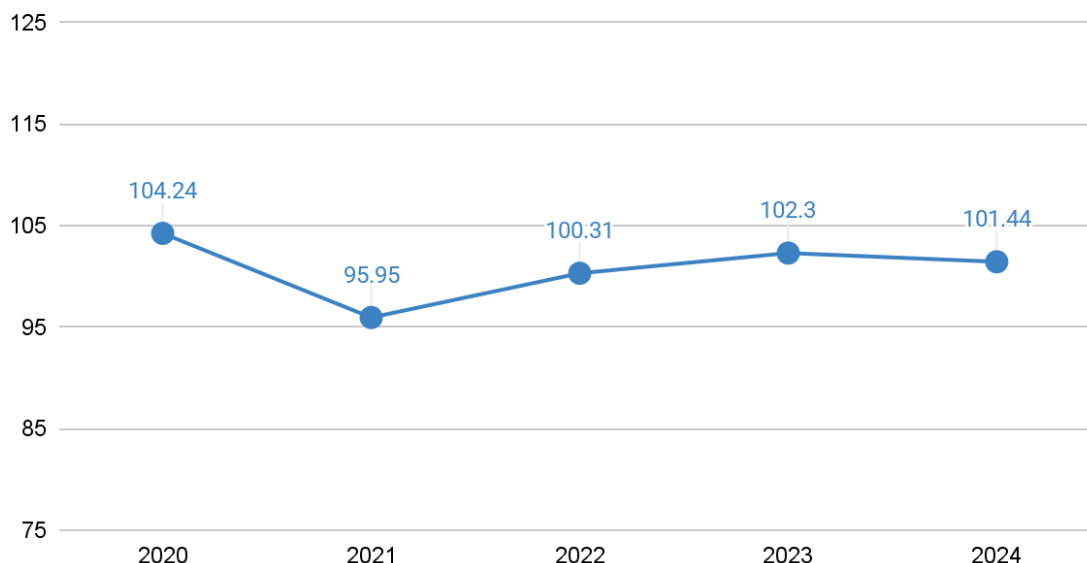
Selama periode tahun 2020 - 2024, capaian kinerja Sasaran Kegiatan ketiga sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung



SK ini terdiri dari 3 IKSK sebagai berikut :

IKSK 7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Capaian kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 109,42%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2021 sebesar 100%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKSK ini termasuk kedalam kategori “Menurun”. walaupun demikian, dari aspek realisasi kinerja, IKSK ini mengalami peningkatan realisasi dari Tahun 2020 - 2024, akan tetapi tidak sebanding dengan peningkatan targetnya.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



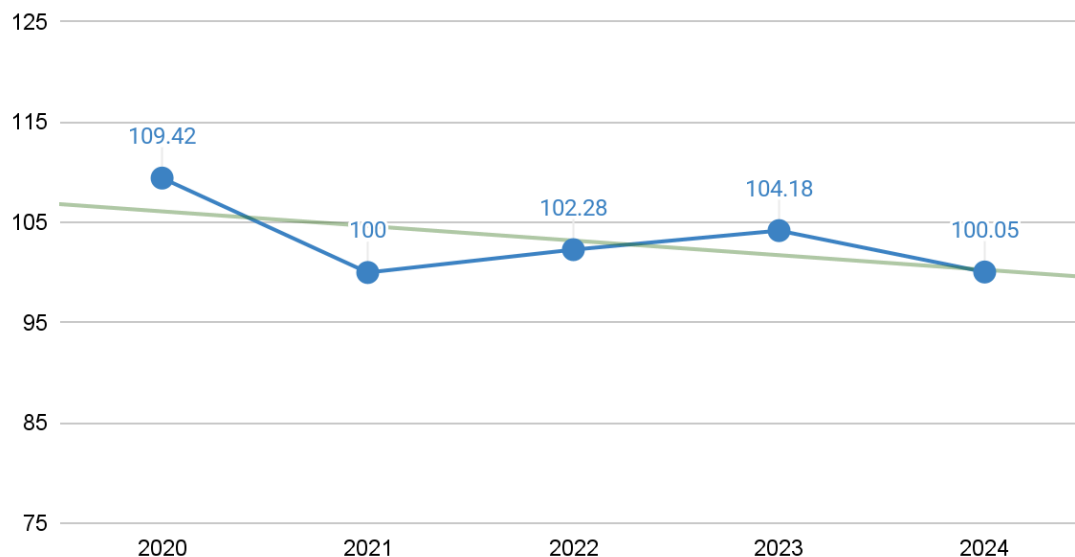
Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

IKSK 7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan



IKSK 8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Capaian kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 106,24%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2021 sebesar 88,81%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKS ini termasuk kedalam kategori “Meningkat”.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



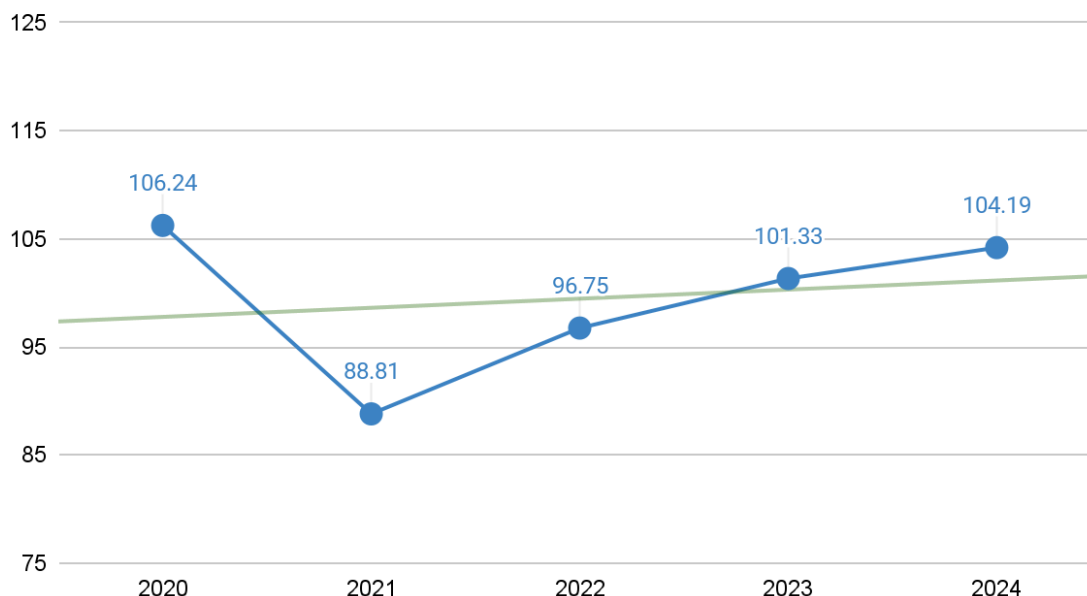
Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

IKSK 8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan



IKSK 9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung

Capaian kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 104,21%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2020 sebesar 97,07%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKSK ini termasuk kedalam kategori “Meningkat”.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



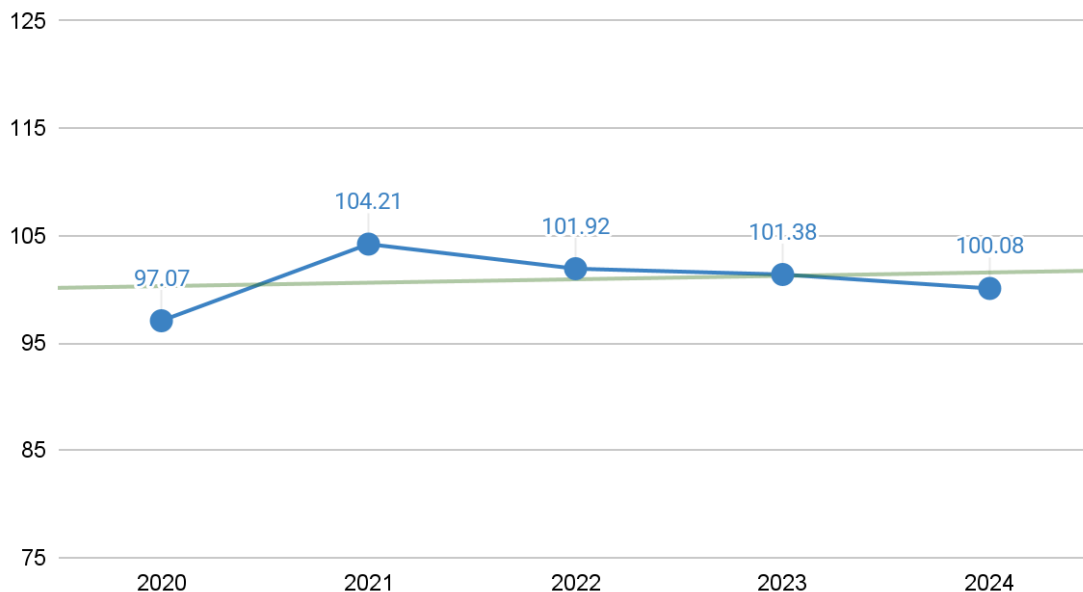
022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung



4. Sasaran Kegiatan Keempat (SK 4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Bandung mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Bandung perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Sasaran kegiatan ini diukur dengan 8 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase



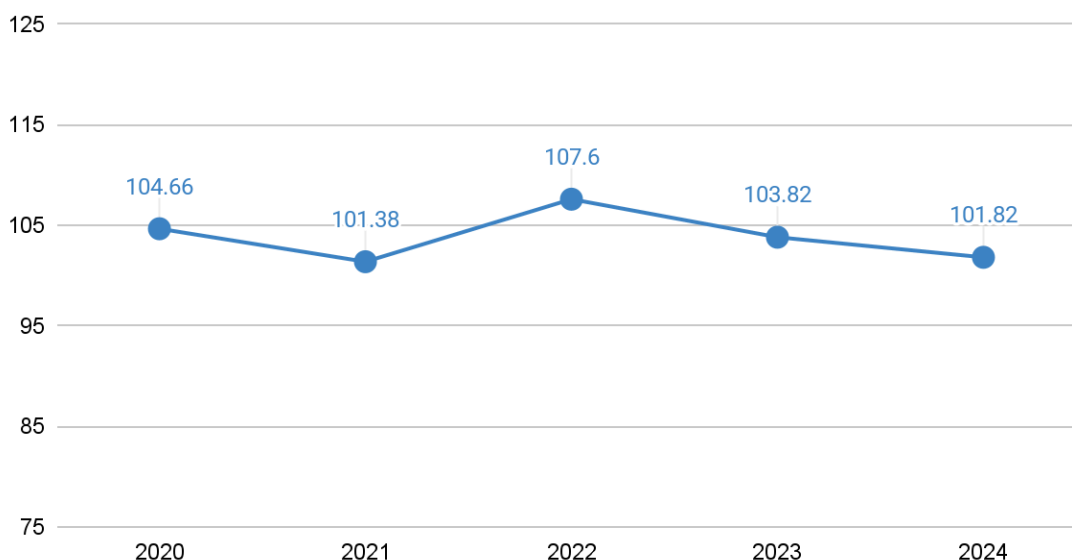
RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Indeks Pelayanan Publik, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, dan Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Selama periode tahun 2020 - 2024, capaian kinerja Sasaran Kegiatan keempat sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung



SK ini terdiri dari 8 IKSK Sebagai berikut :

IKSK 10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Capaian kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2023 sebesar 102,04%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2020 sebesar 95,94%. berdasarkan trend



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

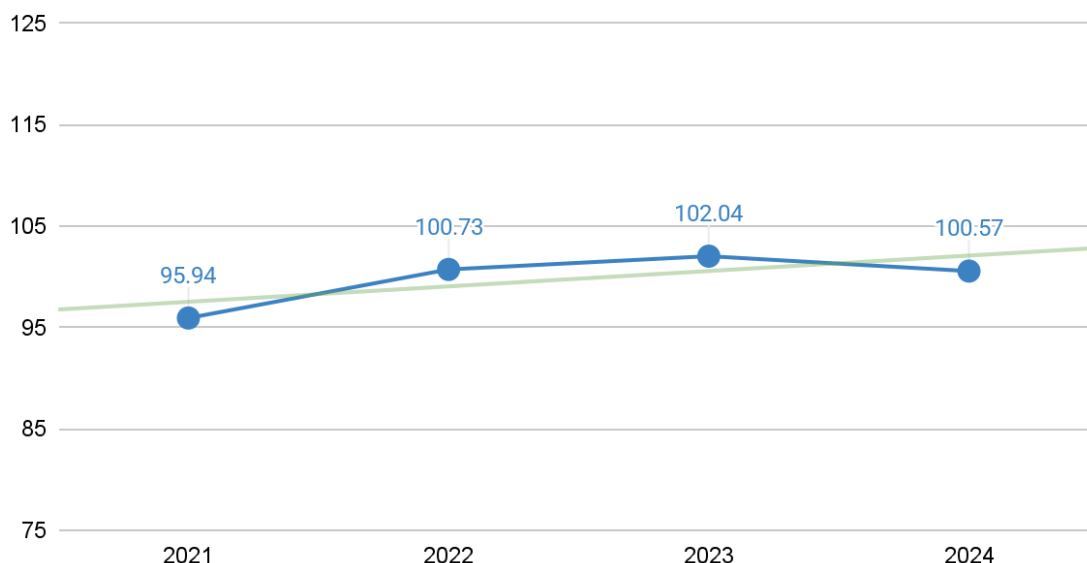
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

analysis, perkembangan kinerja IKSK ini termasuk kedalam kategori “Meningkat”.

IKSK 10. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan



IKSK 11. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Capaian kinerja Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2023 sebesar 115,33%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2021 sebesar 87,72%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKSK ini termasuk kedalam kategori “Meningkat”.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546

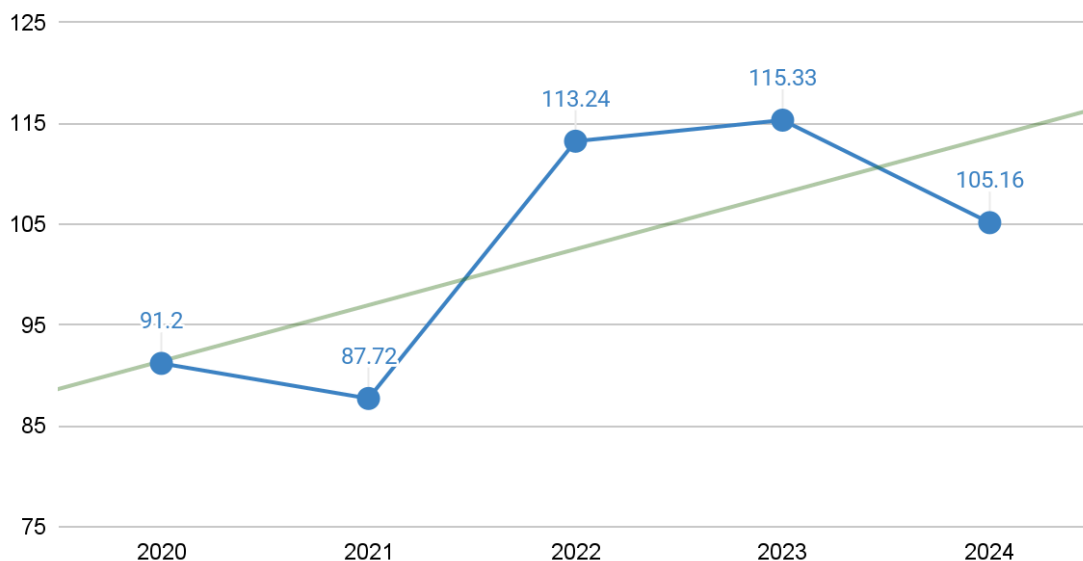


Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

IKSK 11. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan



IKSK 12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Capaian kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 115,48%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2024 sebesar 100,03%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKS ini termasuk kedalam kategori “Menurun”. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan jumlah permohonan sertifikasi yang signifikan, walaupun demikian target kinerja setiap Tahun tetap dapat tercapai.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



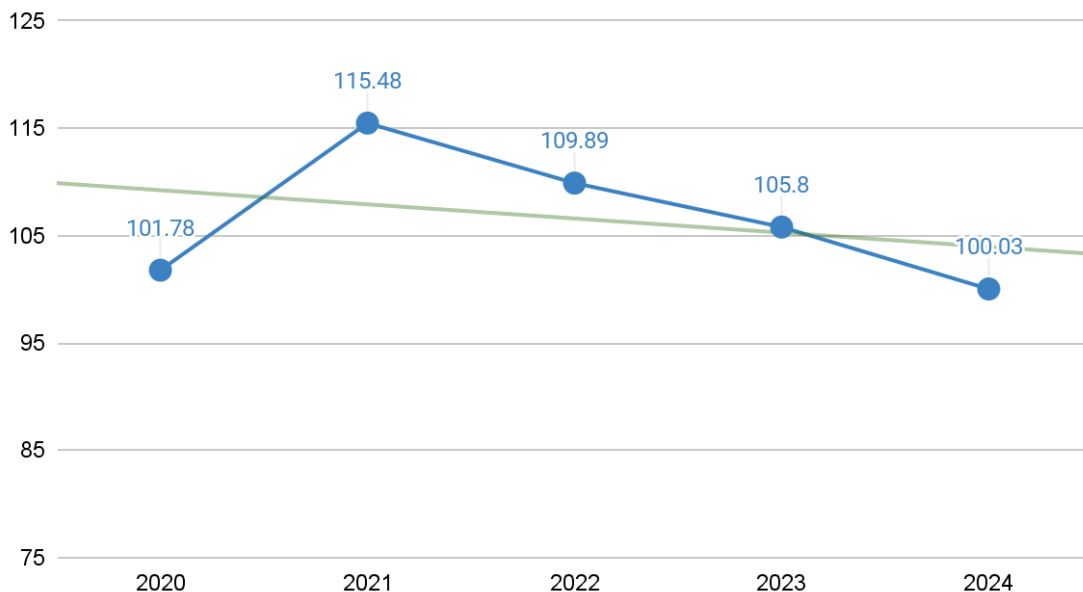
Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

IKSK 12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu



IKSK 13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Capaian kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 113,18%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2021 sebesar 89,71%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKSK ini termasuk kedalam kategori “Menurun”. Hal ini disebabkan masih tingginya sarana produksi pangan dan Industri Rumah Tangga Pangan yang tidak memenuhi ketentuan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546

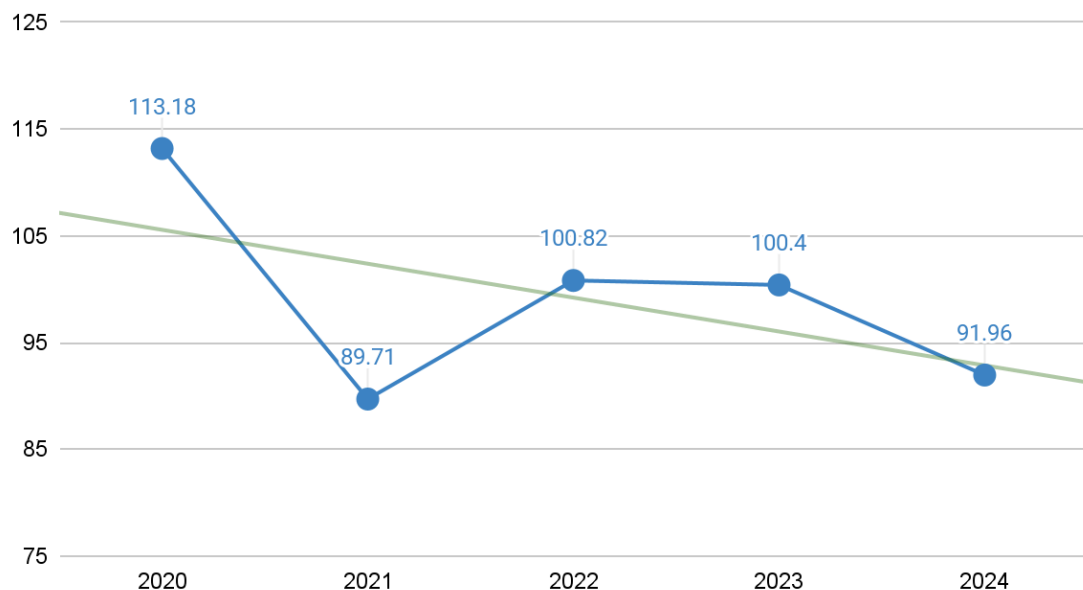


Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

IKSK 13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



IKSK 14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Capaian kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 116,44%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2020 sebesar 96,96%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKS ini termasuk kedalam kategori “Menurun”. Target kinerja tahunan dapat tercapai, akan tetapi masih ada beberapa sarana distribusi yang persentase memenuhi ketentuannya dibawah 81%, yaitu : PBF, Apotek, Toko Obat, Klinik dan sarana distribusi Obat Tradisional.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



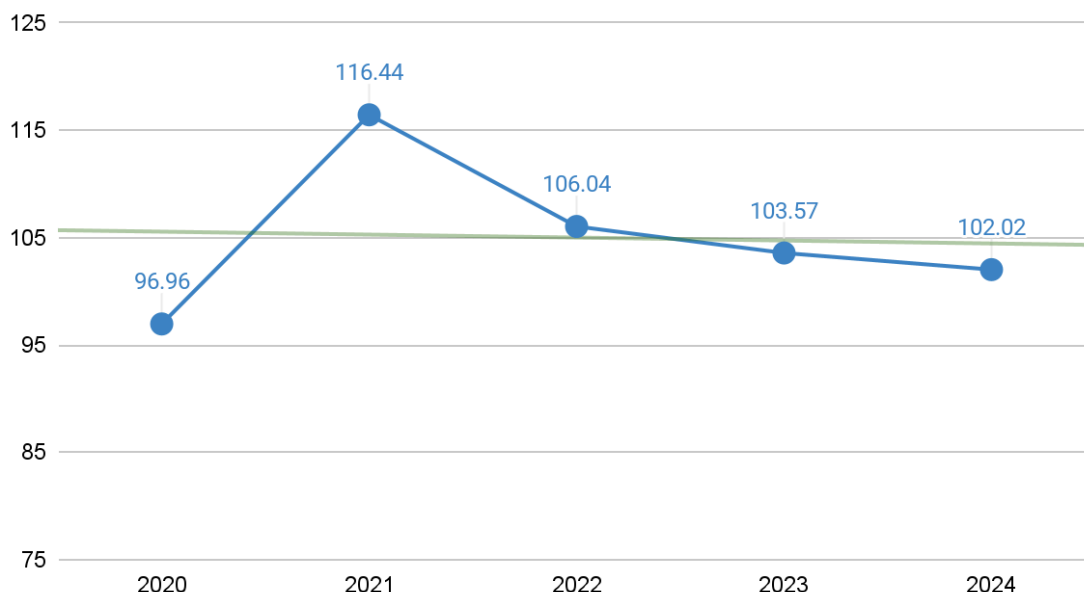
Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

IKSK 14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan



IKSK 15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung

Capaian kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 113,51%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2023 sebesar 94,09%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKS ini termasuk kedalam kategori “Menurun”. Apabila dilihat dari perkembangan realisasi kinerja, Tahun 2024 telah mencapai nilai realisasi kinerja yang paling tinggi dalam rentang Tahun 2020-2024, yaitu sebesar 4,90. Penurunan capaian dikarenakan perbedaan penetapan kenaikan target setiap tahun.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



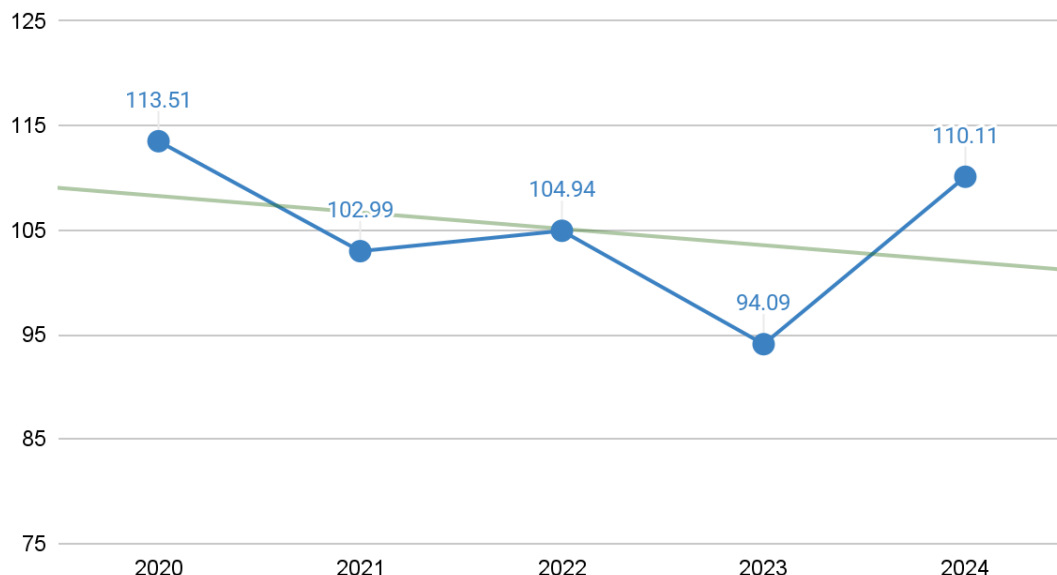
Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

IKSK 15. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung



IKSK 16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Capaian kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 117,5%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2024 sebesar 100%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKS ini termasuk kedalam kategori "Menurun". Apabila dilihat dari perkembangan realisasi kinerjanya, Tahun 2024 telah mencapai nilai realisasi kinerja yang paling tinggi dalam rentang Tahun 2020-2024, yaitu sebesar 100. Penurunan capaian dikarenakan perbedaan penetapan kenaikan target setiap tahun.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



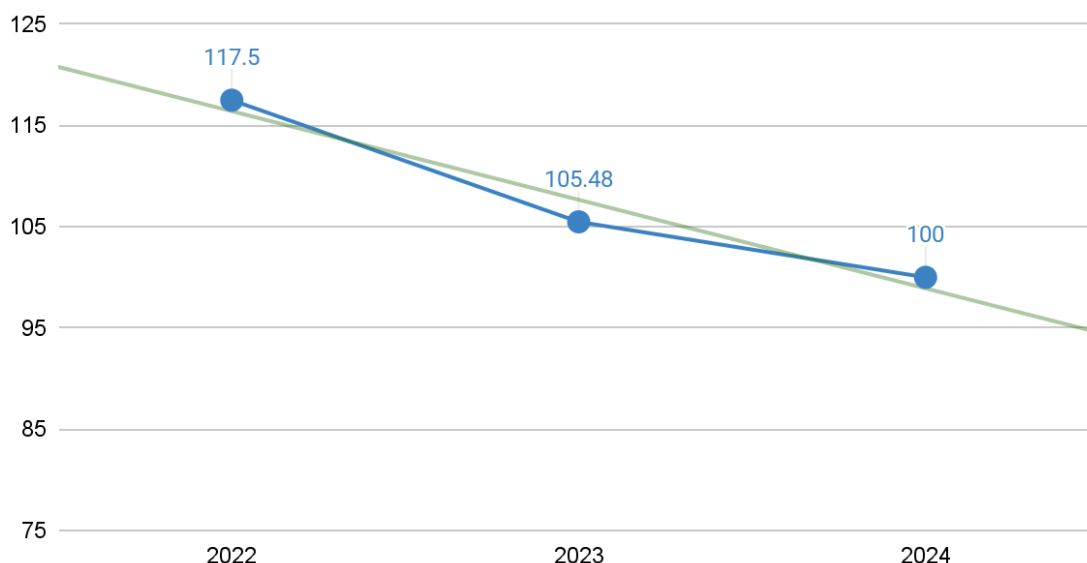
022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik



IKU 17. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota hanya dihitung pada Tahun 2025 dengan Capaian 104.74%.

5. Sasaran Kegiatan Kelima (SK 5) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung

Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. BBPOM di Bandung melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, dan Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

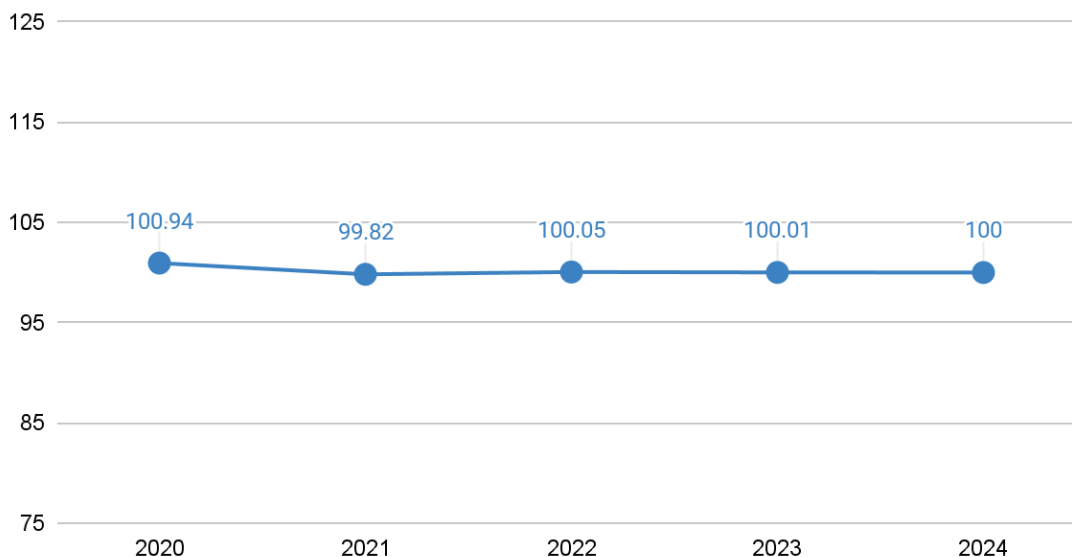


RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Selama periode tahun 2020 - 2024, capaian kinerja Sasaran Kegiatan kelima sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung



SK ini terdiri dari 4 IKSK sebagai berikut :

IKSK 18. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Capaian kinerja Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 103,74%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2021 sebesar 99,29%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKSK ini termasuk kedalam kategori “Menurun”. Apabila dilihat dari perkembangan realisasi kinerjanya, Tahun 2024 telah mencapai nilai realisasi kinerja yang paling tinggi dalam rentang Tahun 2020-2024, yaitu sebesar 96,6. Penurunan capaian dikarenakan perbedaan penetapan kenaikan target setiap tahun.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



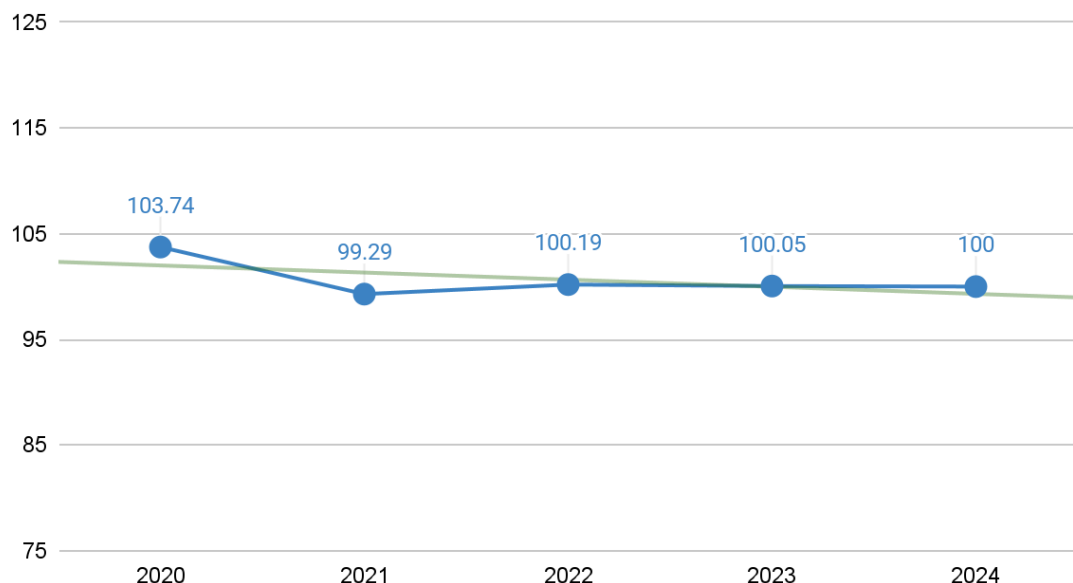
Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

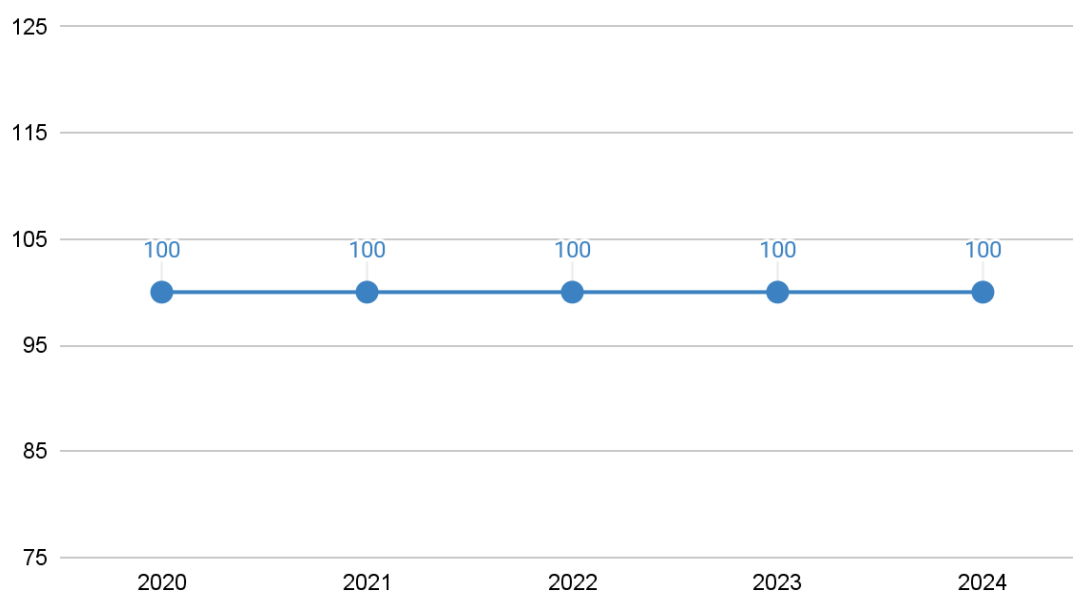
IKSK 18. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan



IKSK 19. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

Capaian kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dalam rentang Tahun 2020 - 2024, sama setiap tahun, yaitu sebesar 99,29%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKS ini termasuk kedalam kategori "Stagnan".

IKSK 19. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

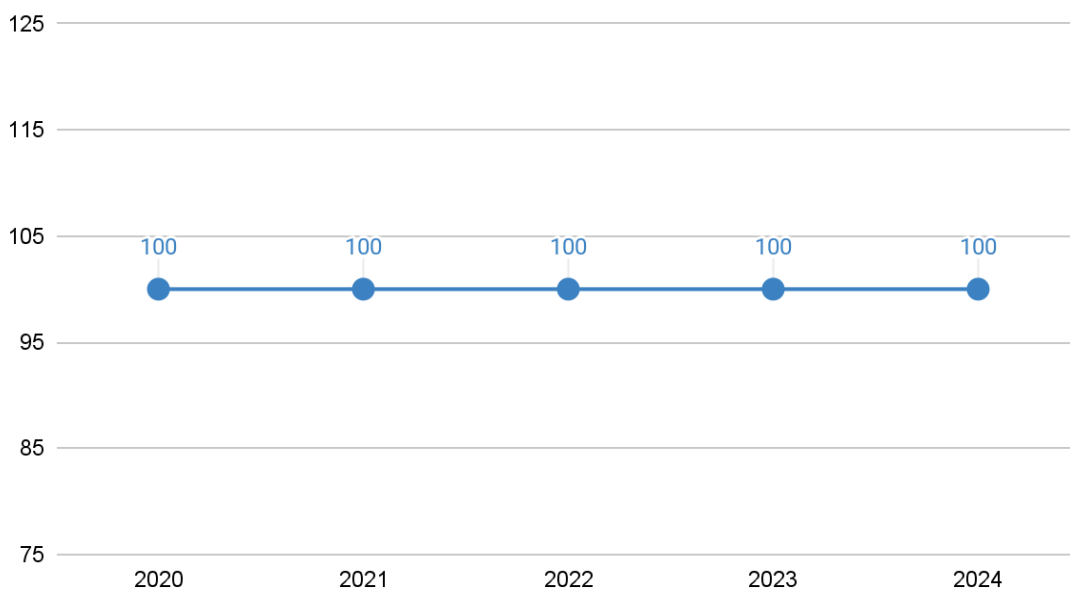
RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

IKSK 20. Jumlah desa pangan aman

Capaian kinerja Jumlah desa pangan aman dalam rentang Tahun 2020 - 2024, sama setiap tahun, yaitu sebesar 100%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKS ini termasuk kedalam kategori “Stagnan”.

IKSK 20. Jumlah desa pangan aman



IKSK 21. Jumlah pasar pangan berbasis komunitas

Capaian kinerja Jumlah pasar pangan berbasis komunitas dalam rentang Tahun 2020 - 2024, sama setiap tahun, yaitu sebesar 100%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKS ini termasuk kedalam kategori “Stagnan”.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



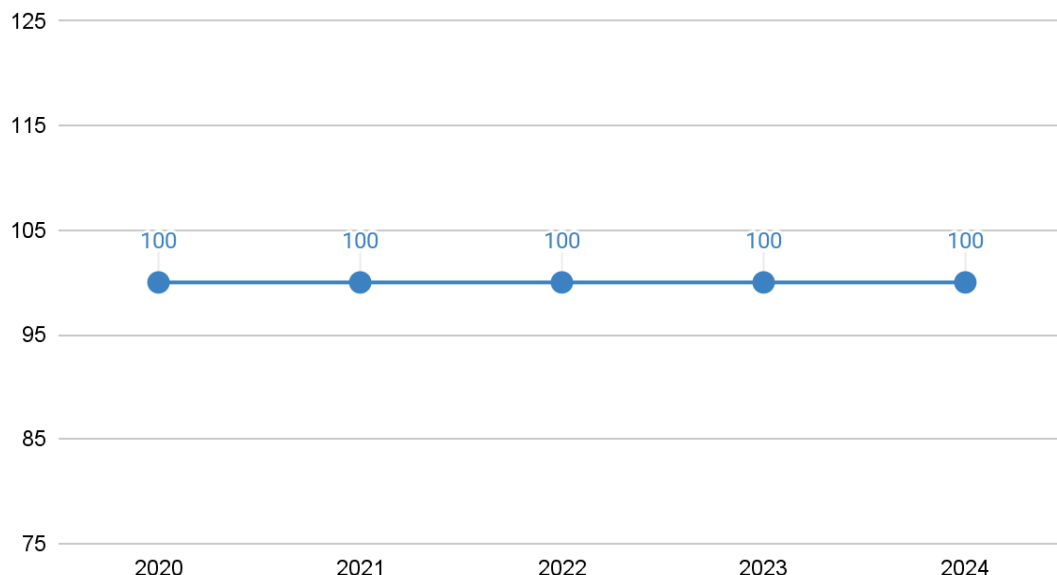
022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 21. Jumlah pasar pangan berbasis komunitas



6. Sasaran Kegiatan Keenam (SK 6) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) diantaranya mencakup pengujian produk. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Bandung mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Sasaran kegiatan ini diukur dengan 2 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

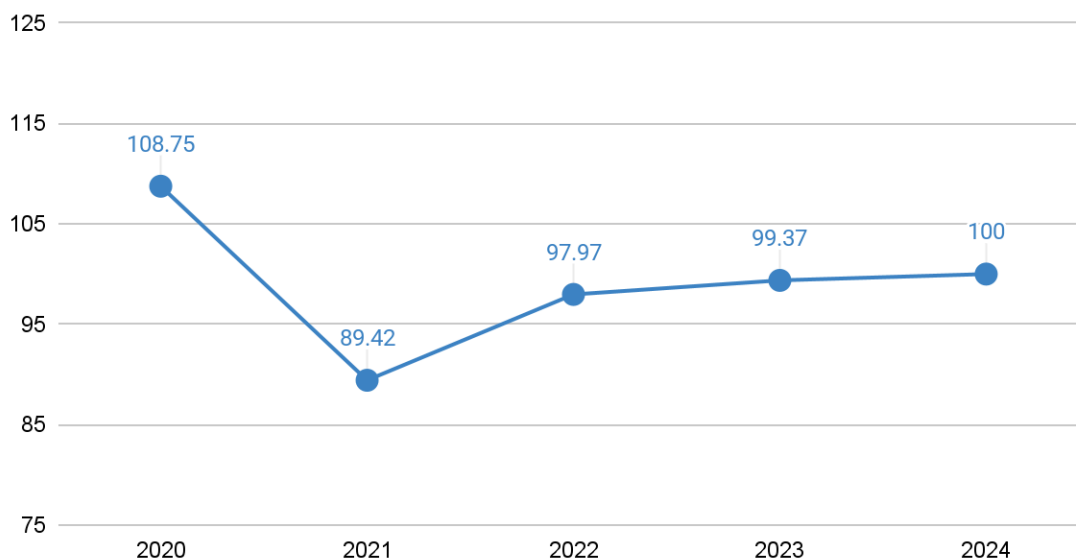
Selama periode tahun 2020 - 2024, capaian kinerja Sasaran Kegiatan keenam sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung



SK ini terdiri dari 2 IKSK sebagai berikut :

IKSK 22. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Capaian kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2024 sebesar 120%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2021 sebesar 87,03%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKSK ini termasuk kedalam kategori “Meningkat”.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



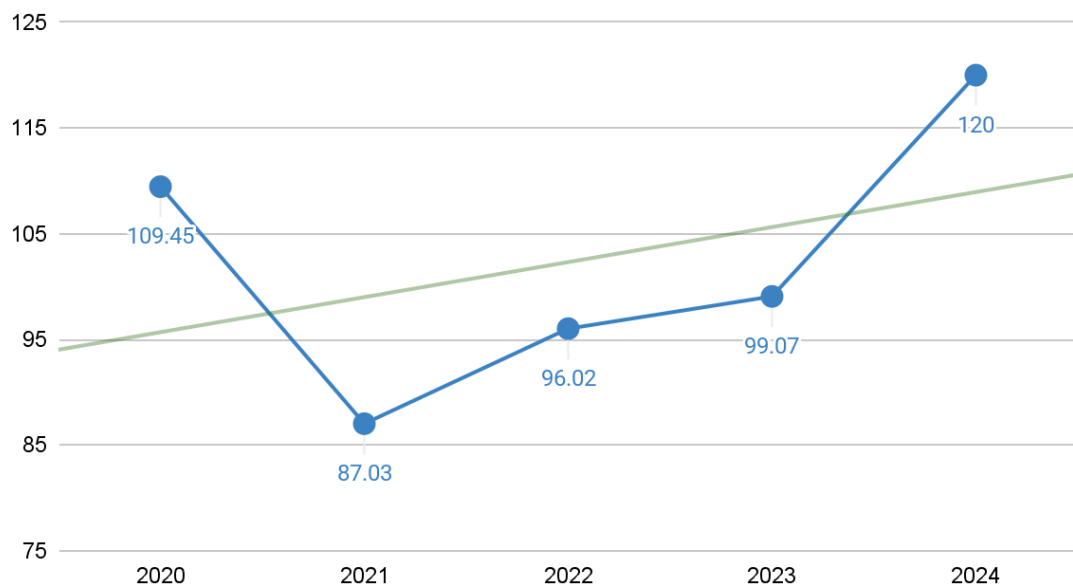
Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

IKSK 22. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar



IKSK 23. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Capaian kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2024 sebesar 120%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2021 sebesar 91,82%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKS ini termasuk kedalam kategori “Meningkat”.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id

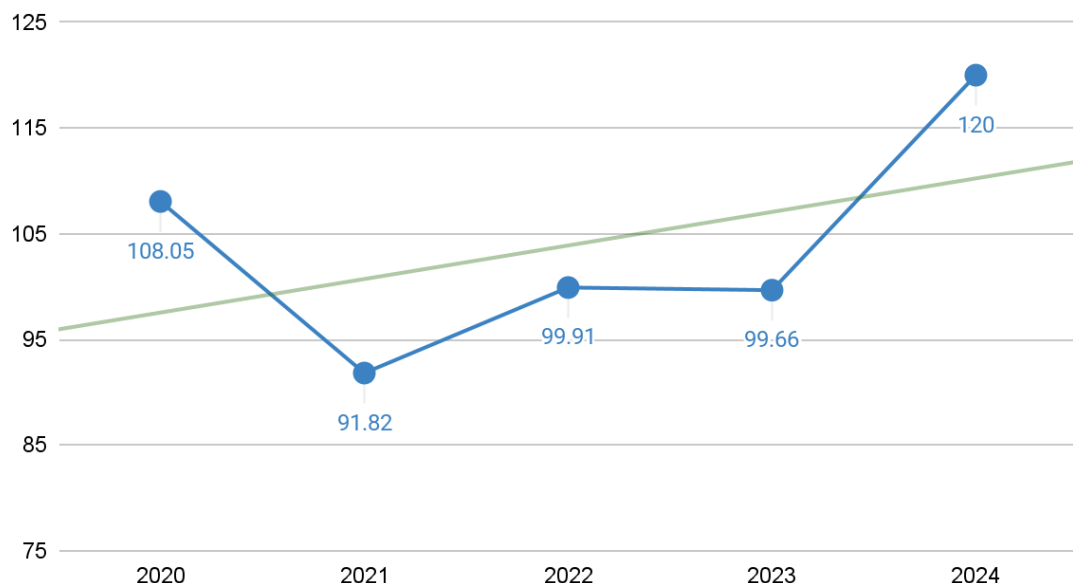


022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

IKSK 23. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar



7. Sasaran Kegiatan Ketujuh (SK 7) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BBPOM di Bandung menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Bandung melalui penyidikan tindak pidana Obat



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

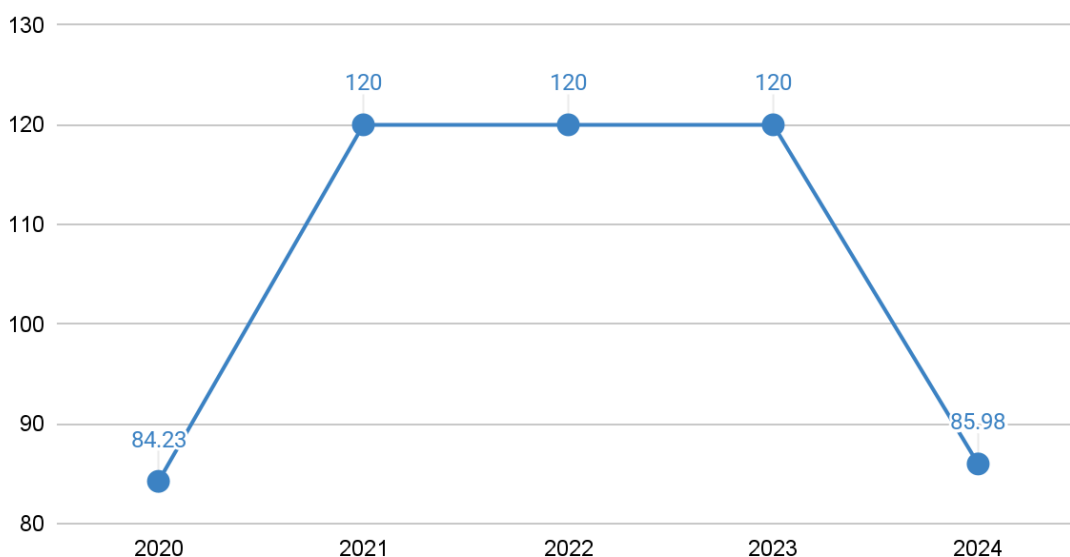
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Selama periode tahun 2020 - 2024, capaian kinerja Sasaran Kegiatan ketujuh sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung

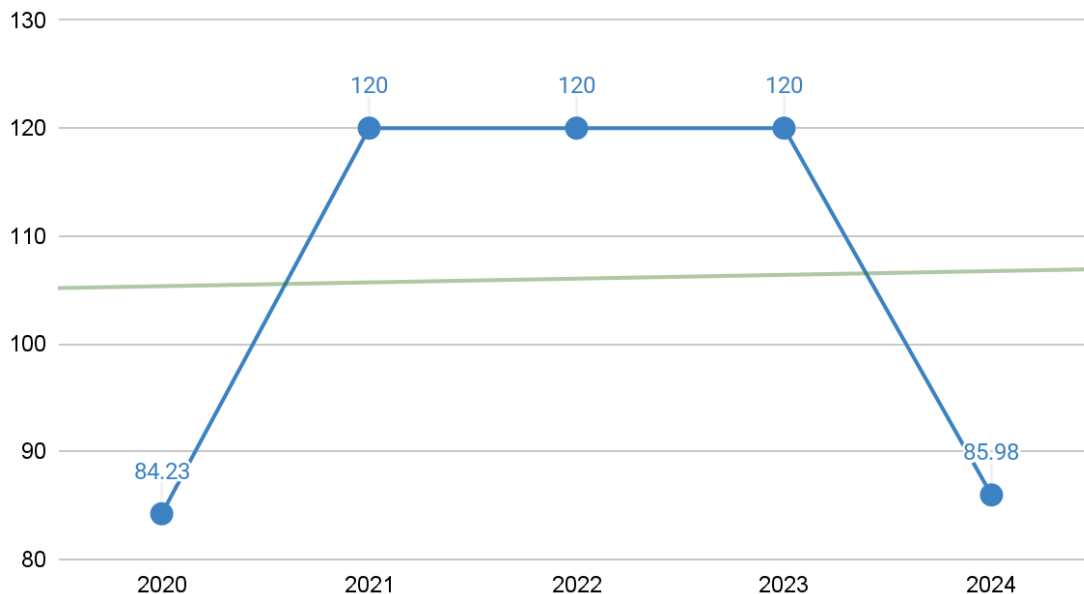


SK ini terdiri dari 1 IKSK yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan hasil sebagai berikut :

Capaian kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2021, 2022, 2023 sebesar 120%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2020 sebesar 84,23%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKSK ini termasuk kedalam kategori “Meningkat”.



IKSK 24. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan



8. Sasaran Kegiatan Kedelapan (SK 8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BBPOM di Bandung berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM di Bandung akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. BBPOM di Bandung berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian RB meliputi penilaian RB dan SAKIP. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BBPOM di Bandung untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

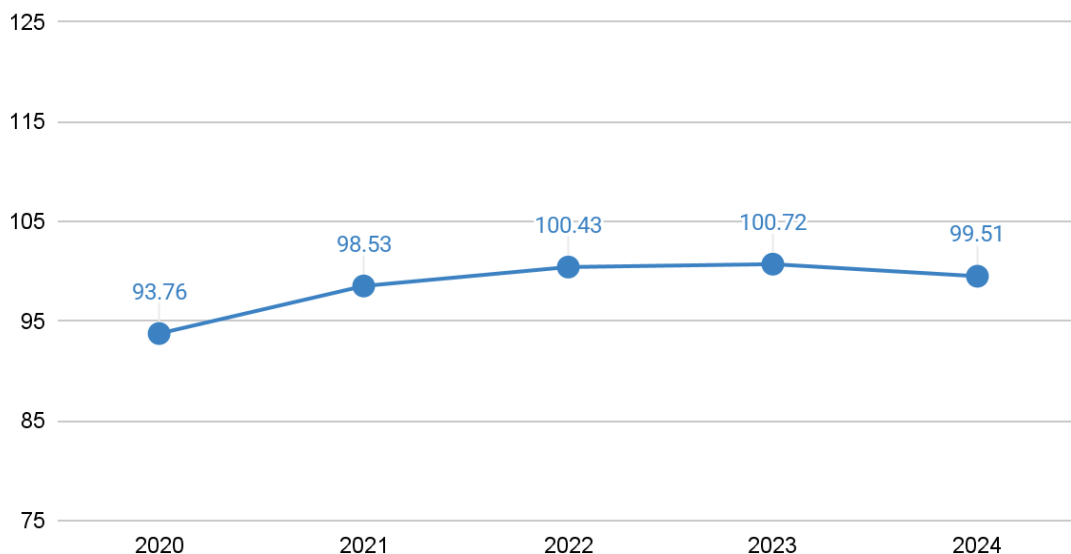
secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Bandung, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Bandung. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (RB) UPT, Nilai Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintah (AKIP) UPT, dan Nilai Pengelolaan Kearsipan.

Selama periode tahun 2020 - 2024, capaian kinerja Sasaran Kegiatan kedelapan sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Sasaran Kegiatan 8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal



SK ini terdiri dari 3 IKSK sebagai berikut :

IKSK 25. Indeks RB BBPOM di Bandung



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

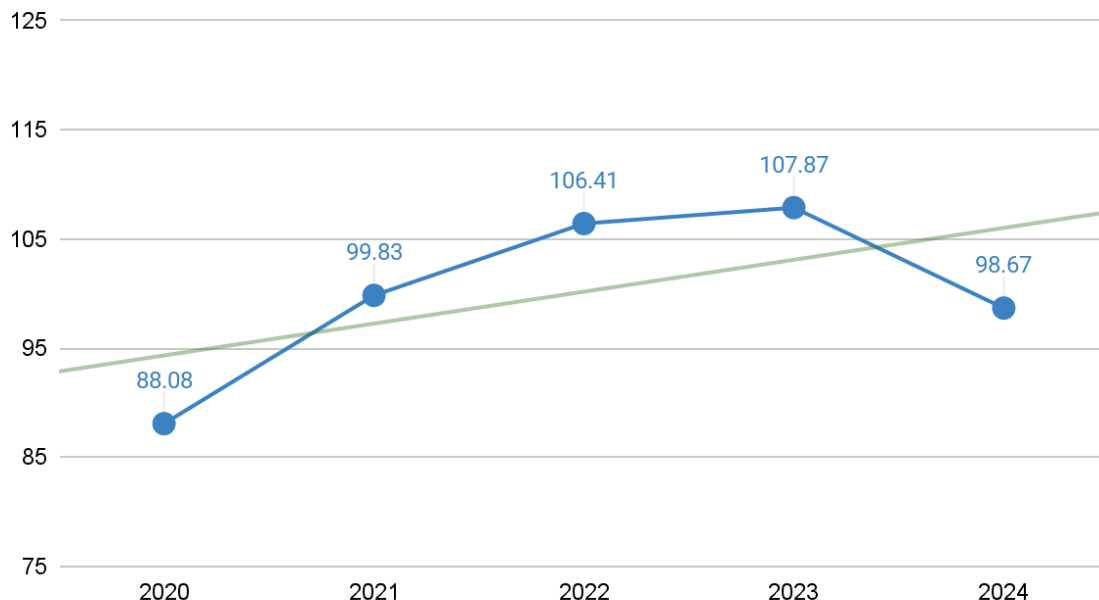
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Capaian kinerja Indeks RB BBPOM di Bandung dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2023 sebesar 107,87%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2020 sebesar 88,08%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKS ini termasuk kedalam kategori “Meningkat”.

IKSK 25. Indeks RB BBPOM di Bandung



IKU 26. Nilai AKIP BBPOM di Bandung

Capaian kinerja Nilai AKIP BBPOM di Bandung dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 99,43%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2023 sebesar 93,57%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKS ini termasuk kedalam kategori “Menurun”. Apabila dilihat dari perkembangan realisasi kinerjanya, Tahun 2024 telah mencapai nilai realisasi kinerja yang paling tinggi dalam rentang Tahun 2020-2024, yaitu sebesar 83,03. Penurunan capaian dikarenakan perbedaan penetapan kenaikan target setiap tahun.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



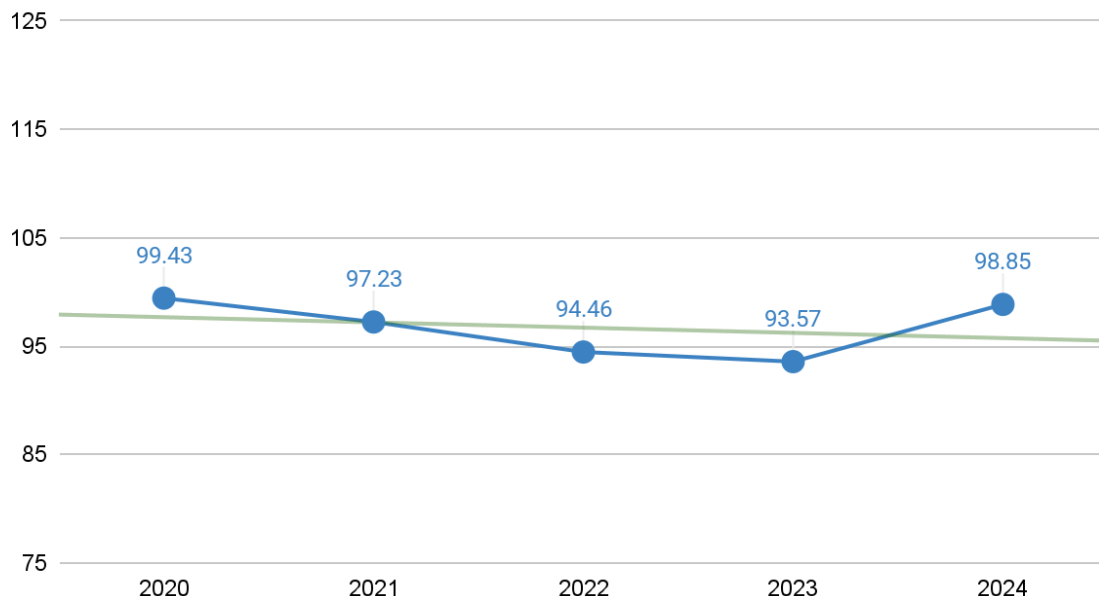
022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 26. Nilai AKIP BBPOM di Bandung



IKSK 27. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Capaian kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan hanya dihitung pada Tahun 2025 dengan Capaian 101.02%.

9. Sasaran Kegiatan Kesembilan (SK 9) Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.



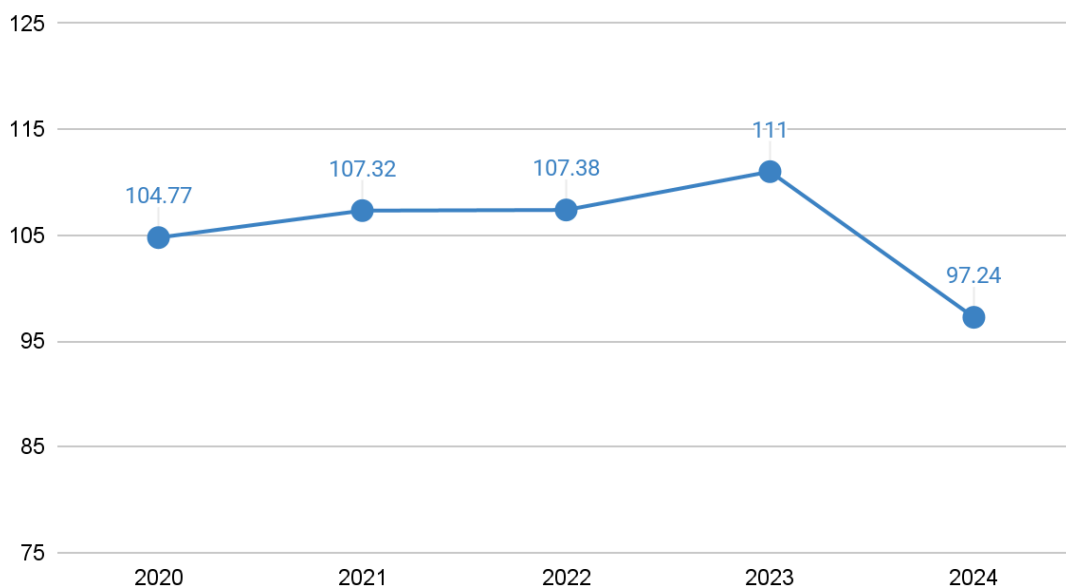
RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sasaran kegiatan ini diukur dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu Indeks Profesionalitas ASN UPT.

Selama periode tahun 2020 - 2024, capaian kinerja Sasaran Kegiatan kesembilan sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Sasaran Kegiatan 9 Terwujudnya sdm BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal



SK ini terdiri dari 1 IKSK yaitu IKSK 28. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung dengan hasil sebagai berikut :

Capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2023 sebesar 111%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2024 sebesar 97,24%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKSK ini termasuk kedalam kategori “Menurun”. Hal ini disebabkan karena terdapat penyesuaian instrument pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/BBM.02.01/SD/K/2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN disampaikan bahwa terdapat perubahan instrumen pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id

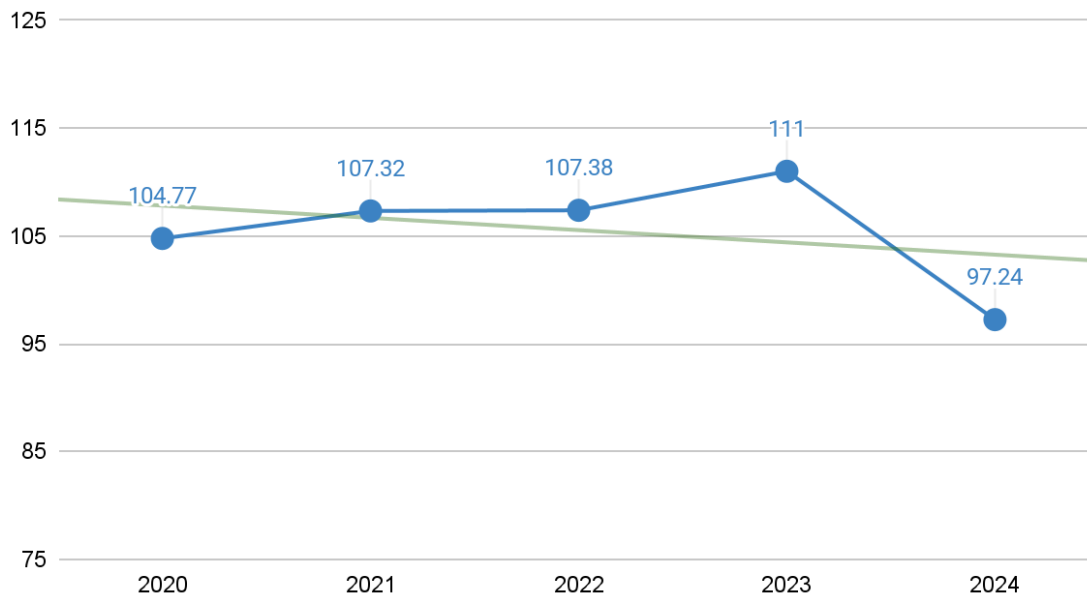


022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

IKSK 28. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung



10. Sasaran Kegiatan Kesepuluh (SK 10) Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah menguatnya laboratorium pengujian BBPOM di Bandung dalam pemenuhan terhadap standar Good Laboratory Practice (GLP) serta sistem operasional, teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BBPOM di Bandung di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BBPOM di Bandung telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BBPOM di Bandung.



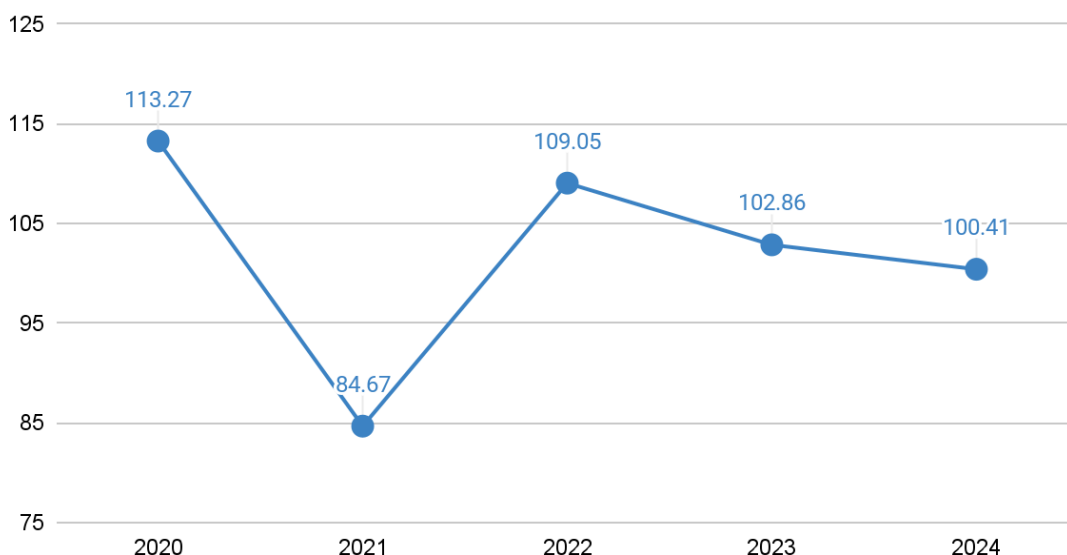
RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sasaran kegiatan ini diukur dengan 2 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.

Selama periode tahun 2020 - 2024, capaian kinerja Sasaran Kegiatan kesepuluh sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Sasaran Kegiatan 10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan



SK ini terdiri dari 2 IKSK sebagai berikut :

IKSK 29. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Capaian kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2024 sebesar 100,82%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2020 sebesar 94,08%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKSK ini termasuk kedalam kategori “Meningkat”.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



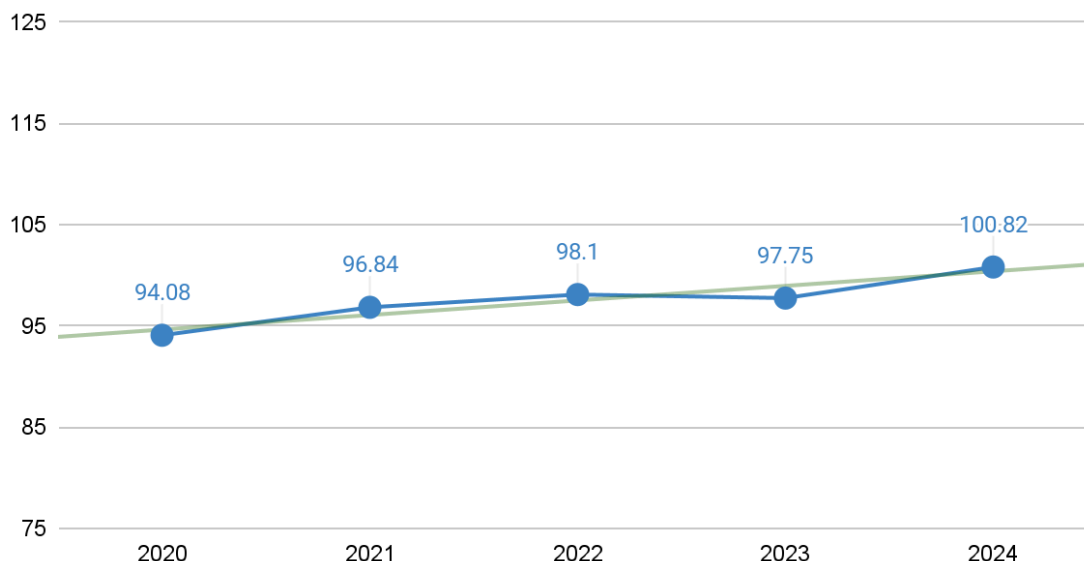
Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

IKSK 29. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP



IKSK 30. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal

Capaian kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 132,45%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2021 sebesar 72,5%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKS ini termasuk kedalam kategori “Menurun”. Apabila dilihat dari perkembangan realisasi kinerjanya, Tahun 2024 telah mencapai nilai realisasi kinerja yang paling tinggi dalam rentang Tahun 2020-2024, yaitu sebesar 3,00. Penurunan capaian dikarenakan perbedaan penetapan kenaikan target setiap tahun..



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



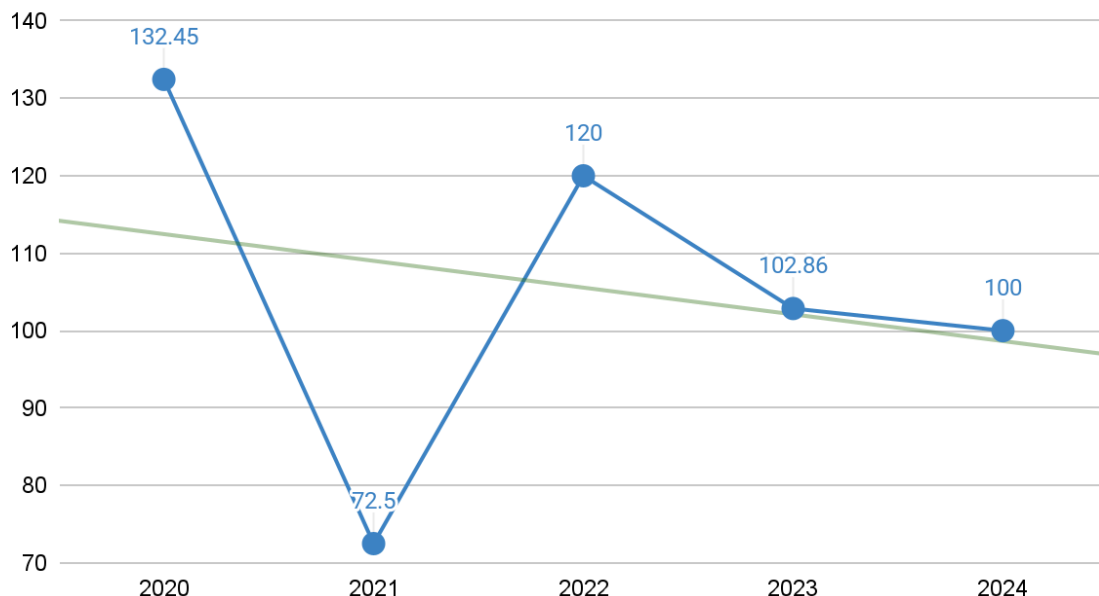
022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKSK 30. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal



11. Sasaran Kegiatan Kesebelas (SK 11) Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BBPOM di Bandung dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Pengelolaan anggaran tidak hanya bersumber dari Proses Keuangan saja namun melibatkan proses Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Barang Milik Negara dimana kegiatan tersebut sangat berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan.

Proses utama Pengelolaan Keuangan dimulai dari Proses Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Penggunaan anggaran, Pencatatan Barang Milik Negara yang nantinya akan menjadi satu kesatuan pada Laporan Keuangan Satuan Kerja. Dengan proses pengelolaan yang baik dan akuntabel, akan menggambarkan bahwa Satuan Kerja Balai Besar POM di Bandung telah berhasil dalam melakukan pengelolaan keuangan dan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

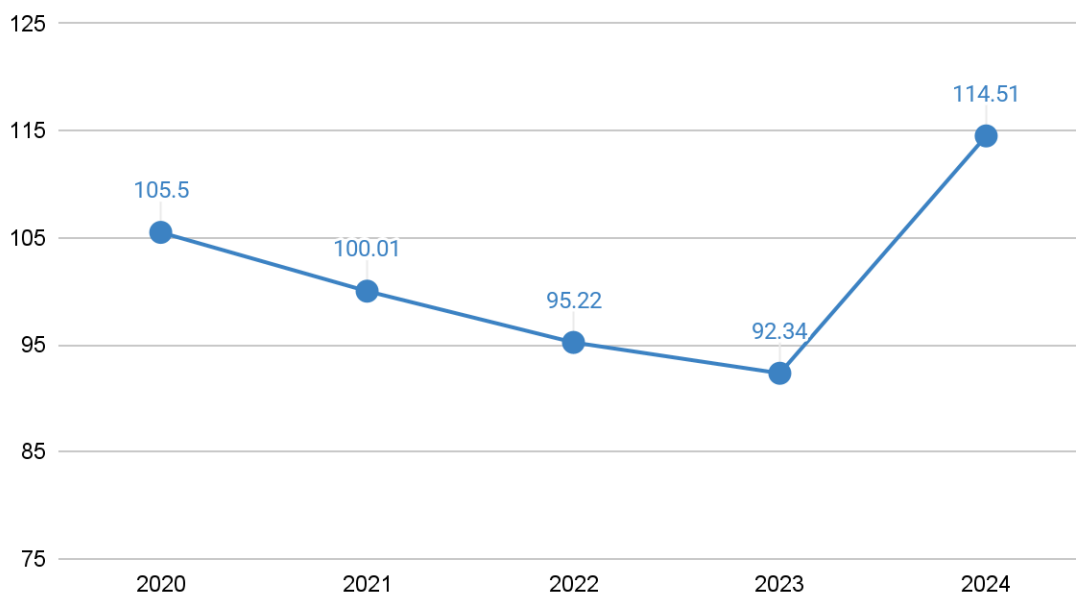
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

menyajikan Laporan Keuangan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu Nilai Kinerja Anggaran UPT, Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.

Selama periode tahun 2020 - 2024, capaian kinerja Sasaran Kegiatan kesebelas sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Sasaran Kegiatan 11 Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel



SK ini terdiri dari 5 IKSK sebagai berikut :

IKSK 31. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung

Capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung dalam rentang Tahun 2020 - 2024, dengan capaian tertinggi pada Tahun 2024 sebesar 104,26%, sedangkan capaian terendah pada Tahun 2023 sebesar 92,34%. berdasarkan trend analysis, perkembangan kinerja IKSK ini termasuk kedalam kategori "Meningkat".



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



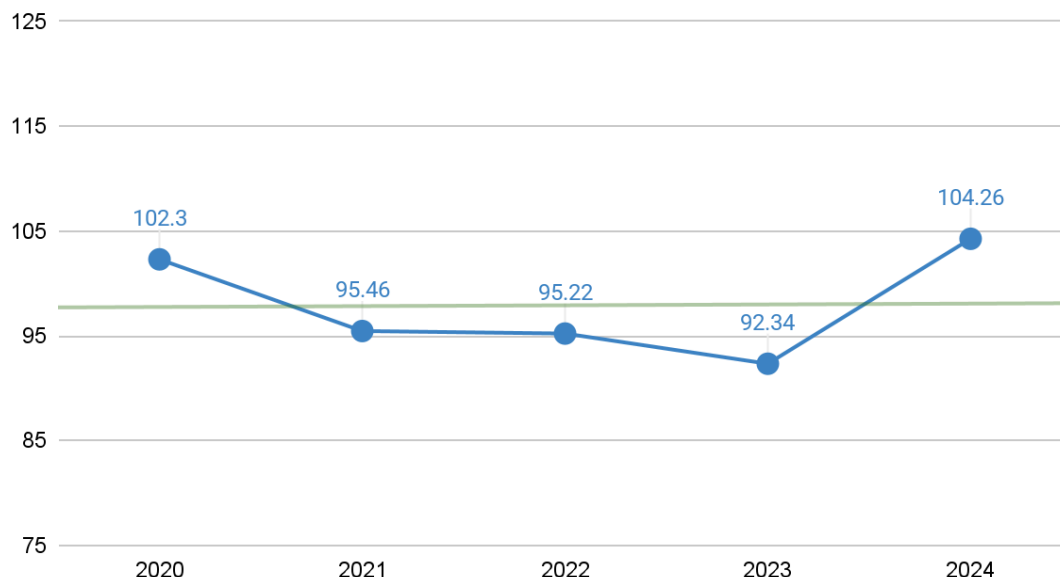
Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

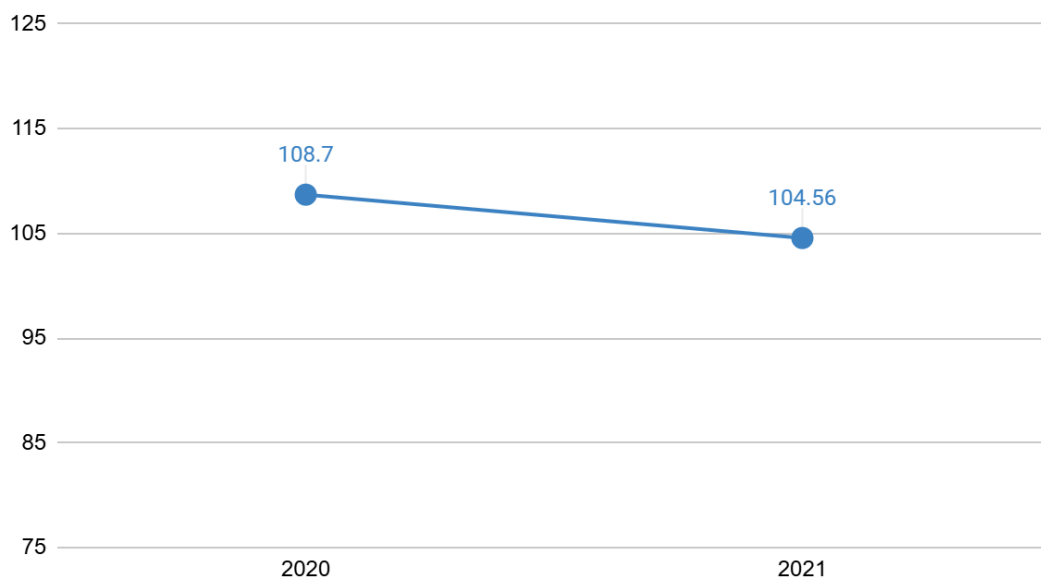
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

IKSK 31. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung



IKSK 32. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung

IKU 32. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung



IKSK 33. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Capaian kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa hanya dihitung pada Tahun 2025 dengan Capaian 126.20%.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

IKU 34. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

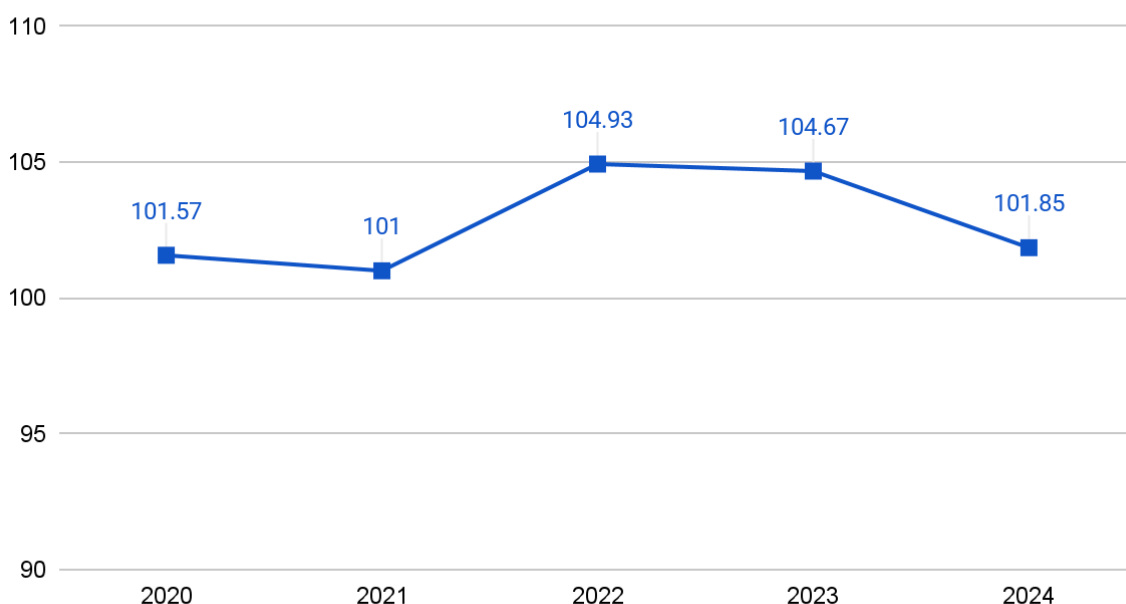
Capaian kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara hanya dihitung pada Tahun 2025 dengan Capaian 113.09%.

IKU 35. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Capaian kinerja Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri hanya dihitung pada Tahun 2025 dengan Capaian 123.17%.

Selama periode tahun 2020 - 2024, capaian kinerja BBPOM di Bandung bersifat fluktuatif diatas 100%. capaian tertinggi ada pada Tahun 2022 sebesar 104,93% dan terendah pada Tahun 2021 sebesar 101%, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Capaian Kinerja BBPOM di Bandung TA 2020 - 2024



Capaian kinerja BBPOM Bandung Tahun 2024, sebagai akhir periode Renstra Tahun 2020-2024, terdapat 5 (delapan) Sasaran Kegiatan yang tercapai, dengan kategori "SANGAT BAIK", 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang tercapai dengan kategori



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“BAIK”, dan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang tidak tercapai, dengan kategori “CUKUP”.

Sasaran Kegiatan yang tercapai dengan kategori “SANGAT BAIK” adalah sebagai berikut :

1. SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung
2. SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung
3. SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
4. SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung
5. SK11. Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel

Sasaran Kegiatan yang tercapai dengan kategori “BAIK” adalah sebagai berikut :

1. SK5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
2. SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
3. SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan yang tidak tercapai dengan kategori “CUKUP” adalah sebagai berikut :

1. SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
2. SK8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal
3. SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal

Aspirasi Stakeholder

Aspirasi masyarakat terhadap BBPOM Bandung sangat penting karena berperan langsung dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta kualitas pelayanan publik di bidang obat dan makanan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, aspirasi masyarakat menjadi aspek yang krusial, karena dapat menjadi umpan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

balik untuk perbaikan layanan. Aspirasi masyarakat, baik berupa kritik, saran, maupun keluhan, dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan. Hal ini memungkinkan BBPOM di Bandung untuk terus memperbaiki sistem pengawasan, menyesuaikan strategi edukasi dan sosialisasi sesuai kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Pengawasan obat dan makanan bukanlah tugas yang statis, diperlukan adaptasi dan inovasi secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berlandaskan aspirasi masyarakat, BBPOM di Bandung dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik, serta mengidentifikasi masalah yang tidak terjangkau oleh pengawasan formal. Hal ini dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam melaporkan produk ilegal atau membahayakan, serta meningkatkan budaya "konsumen cerdas" yang memahami pentingnya memeriksa label, izin edar, dan kadaluarsa (Cek KLIK). Masukan dari masyarakat dapat memicu inovasi dalam pendekatan edukasi dan pengawasan. Kolaborasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menciptakan ekosistem pangan dan obat yang aman.

Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis BBPOM di Bandung 2025-2029. Jika aspirasi masyarakat diperhatikan dan ditindaklanjuti, maka kepercayaan masyarakat terhadap BBPOM di Bandung akan meningkat. Hal ini penting untuk memperkuat legitimasi kebijakan dan keputusan BBPOM di Bandung, serta mendukung keberhasilan jangka panjang dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang berkelanjutan. BBPOM di Bandung menjangring feedback dan aspirasi masyarakat salah satunya melalui Survei Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu serta Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BBPOM di Bandung Tahun 2024. Survey dilaksanakan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan Badan POM pada akhir tahun. Berdasarkan hasil survei tersebut, telah dilakukan analisis data kualitatif atas feedback yang diberikan oleh masyarakat, dan dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan BBPOM di Bandung antara lain:



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1. BBPOM di Bandung diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
2. BBPOM di Bandung agar meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan
3. BBPOM di Bandung diharapkan meningkatkan intensitas dan strategi pelaksana program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Jawa Barat pada periode Tahun 2025-2029 harus memperhatikan kondisi lingkungan strategis yang sangat dinamis. Selain aspek politik, ekonomi, sosial dan iptek, juga harus responsif terhadap dinamika kesehatan nasional dan global serta dapat mengatasi ancaman kesehatan yang baru (emerging diseases) yang mungkin terjadi di rentang periode ini.

Pemetaan dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan strategis perlu dilakukan untuk dapat menggambarkan potensi-potensi yang dimiliki dan tantangan-tantangan masalah yang akan dihadapi. Sehingga dapat merancang strategi pengawasan yang efektif, handal, dan responsif, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan.

Rancangan strategi pengawasan ini harus disusun melalui analisis lingkungan strategis secara holistik dan komprehensif. Analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BPOM periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BPOM, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

A. Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan

Analisis kondisi lingkungan strategis internal BBPOM di Bandung dilakukan untuk dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi kekuatan yang



memiliki peranan vital dalam melaksanakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dan juga aspek-aspek yang menjadi kelemahan secara internal yang dapat menghambat pelaksanaan dan keberhasilan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilaksanakan. Adapun aspek Kekuatan dan Kelemahan dari BBPOM di Bandung dalam pelaksanaan tupoksi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strength), terdiri dari :

1. Transformasi Birokrasi menjadi Pemerintahan yang tangkas (agile governance)

Pemerintahan yang tangkas merupakan konsep pemerintahan yang melakukan simplifikasi terhadap birokrasi, fokus pada sarat kecepatan dan kemudahan sebagai perwujudan dari *dynamic governance* yang menekankan bagaimana kebijakan, institusi, dan struktur pemerintah dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan agar tetap relevan dan efektif.

Kemampuan adaptasi dengan perkembangan terkini mencerminkan bagaimana BPOM secara proaktif dan responsif memperbarui standar dan metodologi pengawasannya untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis dan perkembangan sains dan teknologi. Dengan memastikan bahwa regulasi dan prosedur pengawasan selaras dengan perkembangan terbaru dalam industri obat dan makanan, BPOM dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat, serta mendukung inovasi industri.

Sejalan dengan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, agar Pemerintah melakukan pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak dalam rangka menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. BPOM mendukung tersedianya pangan olahan yang sehat melalui kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) guna menekan faktor



risiko terjadinya penyakit tidak menular dari pola konsumsi yang salah. Dengan demikian diharapkan kebijakan yang disusun dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Selain itu, BPOM meningkatkan kemampuan adaptasinya melalui pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi terkini dalam pengawasan, serta memperkuat kolaborasi dengan lembaga internasional dan pemangku kepentingan industri. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, tetapi juga memposisikan BPOM sebagai lembaga yang tangguh dan dinamis, siap menghadapi tantangan masa depan. Kemampuan adaptasi ini membuktikan komitmen BPOM dalam melindungi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan industri, menjadikannya kekuatan penting dalam membangun sistem pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkelanjutan

2. Komitmen Kepemimpinan yang kuat

Dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, kepemimpinan yang kuat dengan komitmen menjadi penentu arah dan kebijakan yang diambil untuk pencapaian tujuan. Ini tercermin dari komitmen dalam penetapan prioritas, pengelolaan sumber daya dan mampu menggerakkan seluruh elemen organisasi untuk saling bersinergi dan bekerja sama. Dengan adanya kejelasan visi, kemampuan adaptif terhadap perubahan dan inovasi tanpa henti menjadi potensi untuk mendorong transformasi ke depannya, meningkatkan layanan dan pencapaian target kedepannya.

Kepemimpinan di Balai Besar POM di Bandung telah memperlihatkan komitmen membangun pondasi yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan BBPOM di Bandung mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan BBPOM di Bandung tidak hanya beradaptasi



dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan BBPOM di Bandung berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Komitmen yang kuat dari kepemimpinan BBPOM di Bandung menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan komitmennya untuk memenuhi sarana dan prasarana pengawasan, melalui pembuatan redesain tata ruang kantor BBPOM di Bandung yang telah memperhatikan kebutuhan ruang, sarana dan pemenuhan ketentuan kedepannya.

Kepemimpinan yang efektif menanamkan nilai-nilai adaptabilitas dan keberlanjutan, mempromosikan kolaborasi lintas sektor, dan mendorong pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan obat dan makanan. komitmen pemanfaatan teknologi BPOM terlihat dengan digitalisasi seluruh pengawasan baik pre-market dan post-market yang saling terintegrasi dan adanya interoperabilitas antar data dalam kerangka Satu Data POM Jabar.

3. Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia yang memadai

BBPOM di Bandung didukung oleh SDM profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis mendalam dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di BBPOM di Bandung mencerminkan standar tinggi di bidangnya.

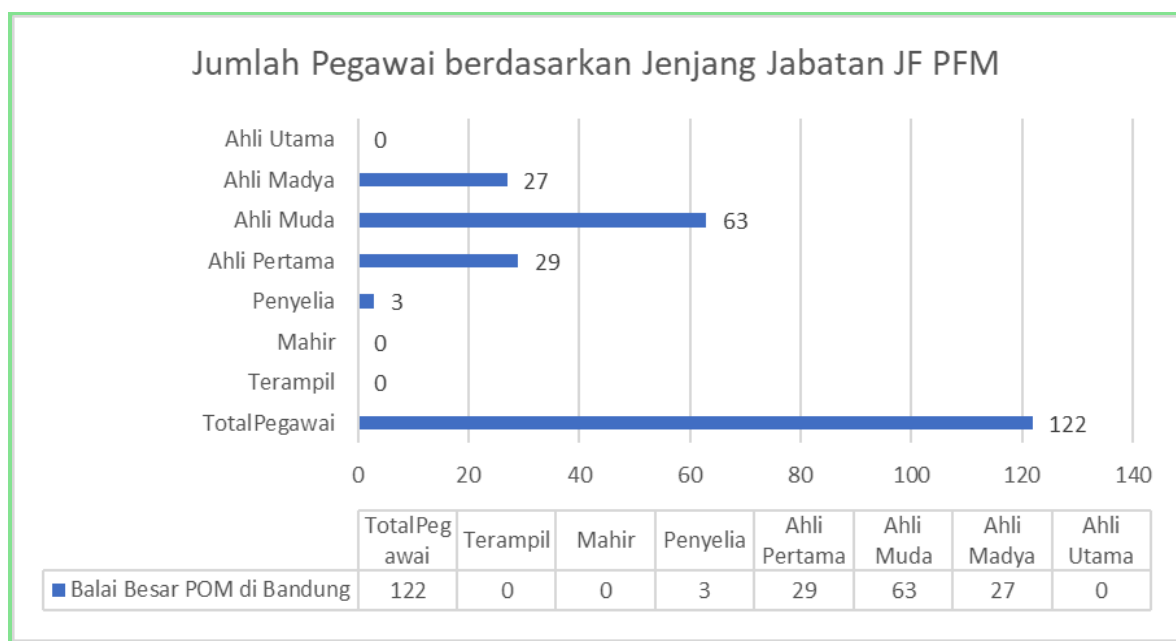
Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM BBPOM di Bandung merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. SDM BBPOM di Bandung terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang,



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

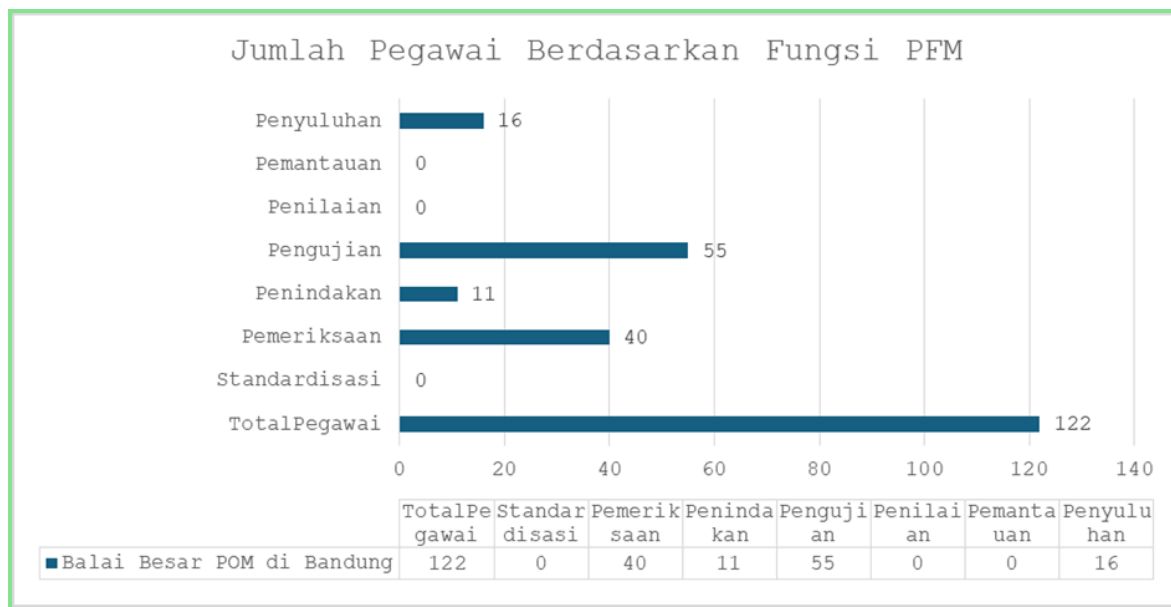
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap obat dan makanan. Untuk dapat melakukan pengawasan obat dan makanan, dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas, spesialisasi, dan fungsi pada setiap jabatannya. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, BBPOM di Bandung telah memiliki Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebanyak 122 pegawai, terdiri dari 55 pegawai dengan spesialisasi pada fungsi pengujian, 40 pegawai dengan spesialisasi fungsi pemeriksaan, 16 pegawai dengan spesialisasi fungsi penyuluhan dan 11 pegawai dengan spesialisasi fungsi penindakan.



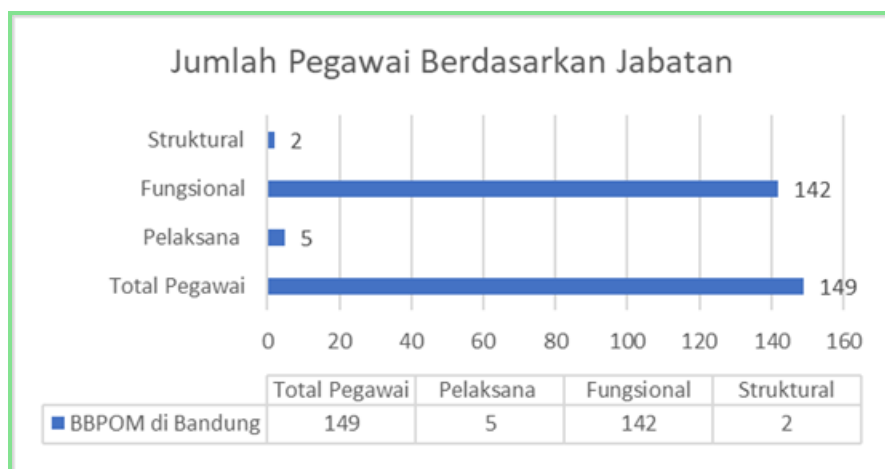
RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG



Selain Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, BBPOM di Bandung juga didukung oleh jabatan fungsional lainnya seperti dibawah ini:





Kompetensi teknis dan spesialisasi jabatan yang dimiliki SDM BBPOM di Bandung secara rutin melaksanakan pelatihan teknis dan pengembangan kompetensi berkelanjutan dalam aspek pengawasan obat dan makanan. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek pengawasan hingga pemahaman tentang inovasi teknologi yang dapat mempengaruhi regulasi pengawasan. Dengan demikian, SDM BBPOM di Bandung tidak hanya menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga siap untuk mengantisipasi perkembangan yang akan datang di sektor pengawasan obat dan makanan.

4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi

BBPOM di Bandung telah mengadopsi teknologi terkini dalam kegiatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, terutama pemenuhan peralatan instrumen dalam pengujian produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu pemanfaatan teknologi digunakan dalam digitalisasi bisnis proses yang lebih efektif, efisien dan cepat.

Investasi pada peralatan laboratorium modern yang mutakhir telah dimiliki antara lain ICP-MS (*Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy*), GCMS (*Gas Chromatography Mass Spectrometry*) dan RTi-PCR (*Real time -Polymerase Chain Reaction*). Peralatan ini memastikan bahwa evaluasi keamanan dan mutu produk dilakukan sesuai dengan standar yang ketat, agar dapat memberikan perlindungan masyarakat dari produk obat dan makanan yang berbahaya.



Di sisi lain, digitalisasi proses kerja BBPOM di Bandung telah merevolusi cara lembaga ini beroperasi dan berinteraksi baik secara internal maupun dengan stakeholder. Implementasi sistem informasi manajemen yang mengintegrasikan beberapa proses bisnis fungsi, pengembangan aplikasi pelaporan pelaku usaha dalam menyampaikan data perbaikan hasil pemeriksaan, aplikasi sertifikasi UMKM, aplikasi data sarana dan layanan publikasi terintegrasi, semua memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan proses yang lebih efisien, transparan dan mudah diakses oleh publik

Berikut beberapa inovasi dalam pemanfaatan teknologi yang telah diterapkan Balai Besar POM di Bandung diantaranya:

1. Aplikasi Simangga (Sistem Informasi Monitoring Penugasan, Pengadaaan dan Keuangan) yang digunakan dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel efektif dan efisien.
2. Dalam pengelolaan kinerja melalui Google Site Manajemen Kinerja BBPOM di Bandung sebagai aplikasi untuk pengelolaan kinerja BBPOM di Bandung mulai dari perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, sampai dengan pengelolaan anggaran.
3. Aplikasi buku tamu berbasis elektronik berupa SIPETA untuk layanan di ULPK BBPOM di Bandung.
4. Sistem antrian Online untuk pendataan pelanggan di Mall Pelayanan Publik (MPP) pada beberapa Kota/Kabupaten di Jawa Barat.
5. Aplikasi Satu POM Jabar yang menjadi layanan satu pintu yang menjangkau seluruh pelanggan dan sarana dalam pengawas obat dan makanan.

Dengan penerapan digitalisasi dalam proses kerja, meningkatkan kapasitas BBPOM di Bandung sebagai lembaga yang dinamis dan adaptif. Penerapannya digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses pengawasan dan pengujian, tetapi juga mempermudah komunikasi dan kolaborasi antara BBPOM di Bandung dan stakeholder.



5. Laboratorium tersertifikasi ISO 9001:2015 dan terakreditasi ISO IEC 17025:2017

BBPOM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen terintegrasi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian ISO/IEC 17025:2017 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016. Penyelenggaraan sistem manajemen terintegrasi tersebut berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu.

Dengan penerapan sistem manajemen terintegrasi tersebut memberikan manfaat untuk dapat meningkatkan kepercayaan publik melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001:2015 terhadap entitas BBPOM di Bandung sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, hasil pengujian obat dan makanan yang akurat, andal, dipercaya dan diakui nasional dan internasional dengan Laboratorium yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017, serta menjadi lembaga yang bertanggung jawab secara proaktif dalam berkontribusi melawan penyuapan dengan menerapkan sistem anti penyuapan. Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi pelayanan publik, BBPOM di Bandung menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BBPOM di Bandung, yaitu BBPOM di Bandung berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan



menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

6. Sarana prasarana pelayanan publik

BBPOM di Bandung sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik BPOM berkomitmen dalam menjalankan pelayanan publik yang mudah, transparan, dan profesional sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. salah satu bentuk komitmen tersebut ditunjukkan dengan menyediakan sarana prasarana pelayanan publik yang memadai.

Sarana prasarana Pelayanan Publik yang dimiliki oleh BBPOM di Bandung memperkuat peran BPOM dalam menjamin keamanan, mutu dan manfaat produk yang beredar di masyarakat. Sarana publik seperti laboratorium pengujian terakreditasi serta tersedianya pusat layanan informasi publik mendukung efektivitas pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku usaha. Pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai layanan publik, seperti sistem perizinan, hotline layanan publik dan integrasi data pengawasan nasional. Sarana ini memungkinkan proses pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan aksesibilitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja BPOM.

Upaya BBPOM Bandung dalam memperkuat kapasitas operasional dalam penjangkauan masyarakat yang lebih luas termasuk daerah terpencil melalui keikutsertaan pelayanan publik pada Mall Pelayanan Publik (MPP) daerah, meliputi MPP Kota Bandung, MPP Kabupaten Bandung, MPP kota Cimahi dan MPP Kota Bekasi.

Kelemahan (Weakness), terdiri dari :

1. Kapasitas kelembagaan BPOM yang belum optimal

Kedudukan BPOM sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) belum sebanding dengan peran strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang



Peningkatan Efektivitas Pengawasan DRAFT 28 Obat dan Makanan, Kepala BPOM diinstruksikan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi terkait yang meliputi 1 Kementerian Koordinator, 8 Kementerian serta 38 Pemerintah Daerah Provinsi dan 514 Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Peran strategis tersebut perlu diimbangi dengan penguatan kelembagaan BPOM menjadi setingkat kementerian.

Terdapat perbedaan susunan organisasi Deputy antara 3 (tiga) Deputy yang dibagi berdasarkan objek meliputi pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan serta Deputy Bidang Penindakan berdasarkan fungsi. Susunan organisasi Deputy tidak sesuai dengan proses bisnis utama BPOM berdampak pada kurang efektifnya koordinasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. Dicontohkan pelaporan Unit Pelaksana Teknis (UPT) ke organisasi induk menjadi tidak efektif disebabkan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan kepada lebih dari 1 (satu) Deputy sebagai atasan yang dibagi berdasarkan objek dengan fungsi yang sama. Selain itu, susunan organisasi yang masih dibagi berdasarkan objek tidak sesuai dengan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang disusun berdasarkan proses bisnis.

2. Jumlah dan distribusi SDM yang belum memadai

Jumlah dan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) BBPOM di Bandung yang belum memadai merupakan kelemahan yang signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Jawa Barat. Ketika jumlah personel tidak seimbang dengan luas wilayah serta kompleksitas pengawasan yang diperlukan, hal ini dapat menyebabkan beberapa kendala, antara lain:

- a. Pengawasan yang Kurang Optimal: Terbatasnya jumlah SDM mengurangi efektivitas dalam melakukan inspeksi dan pengawasan secara berkala terhadap sarana Produksi dan Distribusi farmasi,



makanan, dan kosmetik di wilayah Jawa Barat yang luas dan beragam. Hal ini akan berdampak pada tingginya risiko peredaran produk Obat dan Makanan di masyarakat yang tidak terjamin keamanannya.

- b. Penanganan Kasus Lebih Lama: Ketidakseimbangan jumlah SDM dapat memperlambat proses penanganan kasus pelanggaran, sehingga berpotensi menurunkan tingkat penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat serta menghambat efektivitas dalam mendeteksi serta menangani pelanggaran.
- c. Distribusi SDM yang Tidak Merata: Konsentrasi SDM yang tidak merata di wilayah tertentu, dengan pemenuhan jumlah ABK SDM yang tidak merata, menyebabkan daerah-daerah yang membutuhkan pengawasan lebih intensif menjadi kurang terlayani dengan baik terutama di wilayah-wilayah di luar pusat kota besar, terpencil dan sulit terjangkau. Hal ini juga dapat menyebabkan perbedaan tingkat kuantitas dan kualitas kegiatan peningkatan kompetensi pegawai, sehingga dapat menimbulkan gap kompetensi yang cukup tinggi di antara pegawai di kelompok fungsi dan dalam jabatan fungsionalnya.
- d. Tugas dan Fungsi yang Terbatas: Dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengujian, dan edukasi, kekurangan SDM mengurangi kapasitas BBPOM Bandung dalam menjalankan tugas untuk menjaga keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Jawa Barat secara optimal, membatasi kapasitas BBPOM di Bandung dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas serta terdapatnya GAP antara percepatan perkembangan inovasi produk yang beredar di masyarakat dengan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung.

Dampak kelemahan ini tidak hanya terbatas pada operasional internal BPOM, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi dalam mengatasi tantangan jumlah dan distribusi SDM untuk menjaga standar pengawasan yang tinggi dan memenuhi ekspektasi publik



3. Sistem Teknologi Informasi yang belum terintegrasi dan tidak optimal
- Sistem teknologi informasi (TI) yang saat ini dimiliki BPOM belum terintegrasi secara optimal. Kondisi sistem TI yang terpisah-pisah antar unit kerja menciptakan hambatan dalam aliran informasi, memperlambat proses dan mengurangi efisiensi operasional keseluruhan.

Sistem TI yang dikembangkan oleh BBPOM di Bandung, belum dapat terintegrasi dengan Sistem yang dikembangkan oleh BPOM. Ketidakmampuan untuk berbagi data dengan lancar antar unit kerja bukan hanya merugikan koordinasi internal, tetapi juga berdampak pada kualitas layanan yang disediakan kepada publik. Infrastruktur TI yang tidak terkoordinasi dengan baik ini menghasilkan duplikasi pekerjaan, meningkatkan potensi untuk kesalahan, menambah waktu penyelesaian pekerjaan dan dapat mengurangi daya tanggap dalam merespon isu sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjadi di wilayah kerja

Sistem TI yang terintegrasi secara komprehensif dan diperbarui secara berkelanjutan antara sistem BPOM yang berlaku untuk seluruh unit kerja dengan sistem BBPOM di Bandung yang dibangun secara proses bisnis internal, tidak hanya akan meningkatkan efisiensi internal BPOM, tetapi juga memperkuat kapabilitas lembaga dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang di era digital, memastikan bahwa BPOM dapat menjaga standar keamanan obat dan makanan untuk Kesehatan masyarakat.

Penggunaan TI dalam sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan telah diterapkan untuk melibatkan secara aktif berbagai komponen masyarakat. akan tetapi pelaksanaannya belum optimal, karena masih belum dimanfaatkan dan digunakan secara maksimal oleh berbagai komponen masyarakat tersebut. untuk itu diperlukan perbaikan sistem menjadi lebih user friendly, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.



4. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Melalui peraturan BPOM no. 15 Tahun 2021 tentang standar sarana dan prasarana kantor di lingkungan Badan POM, telah ditetapkan standar sarpras yang harus dipenuhi oleh setiap UPT, agar dapat membantu pelaksanaan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Sarpras pengawasan yang harus dipenuhi adalah terkait laboratorium, peralatan inspeksi, kendaraan operasional, infrastruktur pelayanan publik, kantor dan fasilitas pendukung serta sistem informasi yang diimplementasikan.

Hasil dari evaluasi pemenuhan standar sarana dan prasarana tersebut, BBPOM di Bandung memenuhi sebesar 71%, termasuk dalam luasan lahan kantor menjadi salah satu yang belum terpenuhi, yang membuat pengembangan pemenuhan sarana prasarana ini menjadi terkendala.

5. Layanan Perizinan

Pada kurun 2020-2024, kemudahan perizinan di Badan POM melalui simplifikasi dan deregulasi persyaratan registrasi, percepatan registrasi untuk mendukung percepatan berusaha, pemberian bimbingan/coaching dalam pemenuhan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan serta pengembangan media komunikasi secara elektronik memberikan dampak terhadap meningkatnya jumlah permohonan dan pemberian izin edar yang memenuhi SLA.

Layanan Perizinan adalah aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan berpengaruh terhadap perekonomian bangsa, kepuasan masyarakat dan kredibilitas BPOM. Namun masih ditemukan adanya kelemahan yang ditemui terkait proses yang masih berbelit, inkonsistensi penyelesaian dan kurangnya pemanfaatan teknologi informasi.

Hal ini akan berdampak pada menurunnya kepuasan masyarakat, munculnya potensi kurangnya transparansi dan respon yang lambat terhadap dinamika kebutuhan masyarakat khususnya Pelaku Usaha.



Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui penguatan sistem digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja layanan melalui Indeks Kepuasan Pelaku Usaha.

B. Identifikasi Peluang dan Ancaman

Analisis kondisi lingkungan strategis eksternal BBPOM di Bandung dilakukan untuk dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi peluang untuk perkuatan dan peningkatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Dan juga aspek-aspek ancaman yang dapat menghambat tercapainya tujuan pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Berikut adalah aspek Peluang dan Ancaman dari kondisi lingkungan strategis dalam pelaksanaan tupoksi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, yaitu:

Peluang (Opportunities), terdiri dari :

1. Kondisi perekonomian wilayah kerja yang berkembang pesat

a. Pertumbuhan ekonomi yang baik

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat Tahun 2024 sebesar 4,95 persen, merupakan pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Jawa Timur. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2024 dari sisi lapangan usaha disumbang oleh Industri Pengolahan dengan andil sebesar 1,51 persen. Adapun dari sisi pengeluaran, sumbangan terbesar berasal dari Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,00 persen.

b. Peningkatan jumlah industri sediaan farmasi dan pangan olahan

Perekonomian yang berkembang pesat biasanya ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha diberbagai sektor, diantaranya di sektor makanan, minuman, kosmetik, obat tradisional, dan farmasi. Dengan pertumbuhan ekonomi, peredaran produk secara online juga meningkat.

Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah di Jawa Barat, sebagai berikut:



TABEL 1.4
PENINGKATAN JUMLAH INDUSTRI OBAT DAN MAKAN

No	Jenis KBLU	Jumlah			
		2020	2021	2022	2023
1	Industri Makanan	241.730	254.446	250.155	288.318
2	Industri minuman	13.861	13.401	15.495	17.042
3	Industri farmasi, Obat dan Obat Tradisional	622	853	752	791
Total		256213.	268.700	266.402	306.151

c. Peningkatan akses jalur distribusi ke seluruh wilayah kerja

Peningkatan akses jalur distribusi ke seluruh wilayah kerja memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja BBPOM di Bandung. Akses jalur distribusi yang lebih luas dan merata memungkinkan BBPOM di Bandung menjangkau wilayah terpencil yang sebelumnya sulit diawasi. Akses distribusi yang baik mendukung kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi, distribusi, peredaran produk, penyuluhan dan edukasi ke daerah-daerah. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BBPOM di Bandung sebagai lembaga yang responsif dan hadir di seluruh wilayah dan mendorong iklim usaha yang sehat dengan menjamin pengawasan adil terhadap pelaku usaha di seluruh daerah.

2. Kondisi sosial wilayah kerja yang berkembang

a. Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai IPM Jawa Barat Tahun 2024 sebesar 74,92 menunjukkan tingkat perkembangan manusia di Jawa Barat termasuk kategori tinggi. nilai IPM ini dihitung berdasarkan tiga dimensi, yaitu dimensi harapan hidup, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak.

Seluruh dimensi pembentuk IPM Tahun 2024 mengalami peningkatan, terutama pada dimensi standar hidup layak. Umur harapan hidup bayi yang lahir (UHH) pada 2024 diperkirakan



mencapai 75,16 tahun, lebih lama 0,25 tahun dibandingkan dengan UHH pada tahun 2023.

Pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas pada 2024 meningkat sebesar 0,12 tahun (0,95 persen), dari 12,68 tahun pada 2023 menjadi 12,80 tahun, serta Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas juga meningkat sebesar 0,04 tahun (0,45 persen), dari 8,83 tahun pada 2023 menjadi 8,87 tahun pada 2024.

Sementara itu, dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) pada tahun 2024 sebesar Rp 12,16 juta rupiah, meningkat 462 ribu rupiah (3,95 persen) dibandingkan tahun sebelumnya

Nilai IPM ini menunjukkan kualitas SDM Jawa Barat yang sudah lebih baik, sehingga berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam peningkatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

b. Indeks Masyarakat Digital Jawa Barat

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan sebuah pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

IMDI Jawa Barat pada tahun 2024 adalah sebesar 46,66, dengan nilai tertinggi pada pilar infrastruktur dan ekosistem, sebesar 62,51. Dengan infrastruktur dan ekosistem digital yang sudah tinggi merupakan modal pengembangan sistem digitalisasi yang sangat dibutuhkan dalam peningkatan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Kerjasama dengan stakeholder telah terjalin dengan baik

Kerja sama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandung dengan stakeholder, seperti industri, akademisi, lintas sektor dan masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Dengan kerja sama yang baik, dapat: Meningkatkan



kesadaran dan kepatuhan industri terhadap regulasi; Meningkatkan kualitas produk obat dan makanan; Meningkatkan keamanan dan kesehatan masyarakat. Kerja sama yang baik juga dapat membantu Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Bandung dalam Mengembangkan regulasi yang lebih efektif; Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai; Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan meningkatkan kapasitas BBPOM Bandung untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BBPOM Bandung dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respon yang lebih cepat terhadap masalah keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

BBPOM Bandung telah mengadopsi teknologi terkini dalam pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan. Investasi pada peralatan laboratorium modern seperti beberapa peralatan mutakhir telah dimiliki BBPOM Bandung antara lain: ICPMS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy) dan GCMS (GasChromatography with Tandem Mass Spectrometry). Peralatan mutakhir ini memungkinkan analisis produk dengan akurasi dan kecepatan yang meningkat dengan efektivitas yang signifikan. Peralatan ini memastikan bahwa evaluasi keamanan dan kualitas produk dilakukan sesuai dengan standar yang sangat ketat,



memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari produk yang berpotensi berbahaya.

5. Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan Teknologi informasi dan digitalisasi juga menjadi Peluang BBPOM di Bandung dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional, dengan mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Penggunaan dokumen digital juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga anggaran dapat dialokasikan lebih untuk kegiatan prioritas teknis yang dapat meningkatkan efektivitas dan cakupan pengawasan.

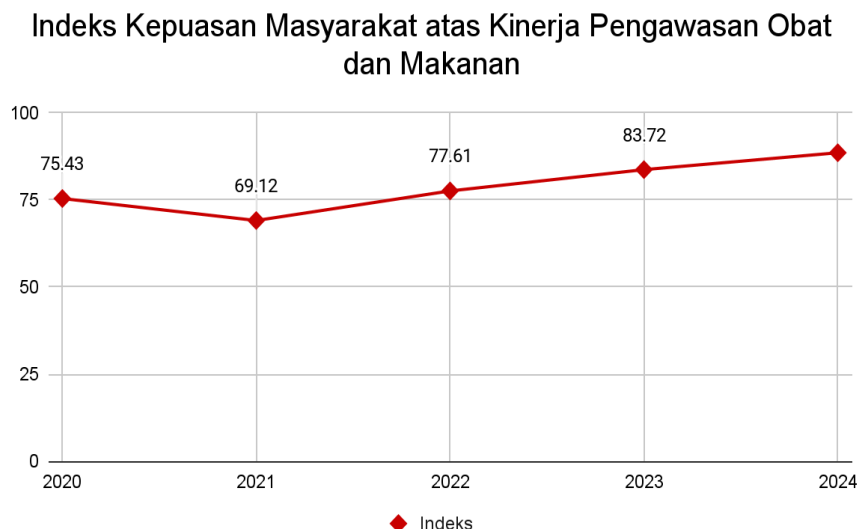
Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan petugas dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, dengan meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas

6. Kepercayaan masyarakat terhadap BBPOM di Bandung

Kepercayaan masyarakat terhadap BBPOM di Bandung ditunjukan dengan nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BBPOM di Bandung. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat yang merupakan dampak atas kinerja pengawasan yang dilakukan oleh BPOM untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, mutu dari produk obat dan makanan. Komoditi yang menjadi lingkup pengawasan yaitu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik



dan makanan termasuk minuman. Dalam rentang Tahun 2020 s/d 2024 mengalami peningkatan, dengan data sebagai berikut :



7. Kebijakan suprasistem terkait sediaan farmasi dan pangan olahan
Kebijakan suprasistem terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan diimplementasikan melalui Instruksi Presiden (Inpres) tentang Obat dan Makanan yang dimaksud adalah Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Inpres ini diterbitkan untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia, melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait, dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu.

Inpres ini menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antar berbagai kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Badan POM, dan pemerintah daerah, dalam pengawasan obat dan makanan. serta meningkatkan pengawasan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan Badan POM sebagai koordinatornya.

Kebijakan ini menjadi peluang Badan POM untuk dapat meningkatkan peran dalam mengkoordinasi kementerian dan lembaga terkait untuk



dapat berkolaborasi meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

8. Penguatan isu kesehatan global

Penguatan isu kesehatan global merupakan upaya strategis yang sangat penting dalam menghadapi tantangan kesehatan lintas negara yang semakin kompleks. Di tengah dinamika tantangan kesehatan global, isu stunting dan gizi buruk telah menjadi prioritas bersama yang membutuhkan respon lintas sektor dan lintas negara. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan, Badan POM berkomitmen memperkuat perannya dalam menciptakan ekosistem pangan yang aman, bergizi, dan berkualitas, khususnya untuk ibu hamil dan anak-anak. Dalam konteks global, BPOM terus mendorong harmonisasi regulasi, memperkuat kemitraan internasional, serta mengadvokasi keamanan dan mutu pangan sebagai bagian dari diplomasi kesehatan.

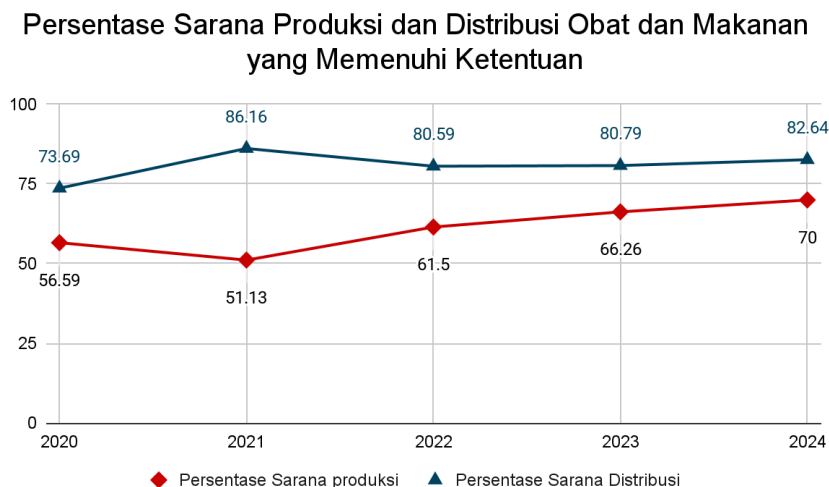
Dengan standar yang harmonis, konsumen Indonesia mendapatkan jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi adalah produk yang aman dan berkualitas, sejalan dengan standar internasional. Ini juga memberikan tekanan positif kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan standar produksi mereka, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Selanjutnya, posisi BPOM sebagai lembaga pengawas yang mengadopsi standar internasional dapat memperkuat perundingan negara dalam perjanjian perdagangan bebas, memberikan Indonesia suara yang lebih berat dalam diskusi regulasi kesehatan global. Harmonisasi regulasi ini, tidak hanya strategis dalam konteks perdagangan dan kesehatan publik tetapi juga dalam memperkuat kedaulatan regulasi nasional di forum internasional.

Ancaman (Threats), terdiri dari :

1. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan di bidang Obat dan Makanan yang masih rendah



Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan di bidang Obat dan Makanan yang masih rendah di wilayah Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari data hasil pengawasan sebagai berikut :



Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha yang tidak memahami sepenuhnya persyaratan dan ketentuan yang berlaku di bidang Obat dan Makanan. Selain itu pengawasan yang tidak efektif dapat membuat pelaku usaha merasa tidak perlu mematuhi persyaratan dan ketentuan, serta penerapan sanksi yang tidak tegas dapat membuat pelaku usaha merasa tidak ada konsekuensi jika tidak mematuhi persyaratan dan ketentuan.

2. Terdapat ketimpangan sosial yang cukup tinggi antar daerah kabupaten / kota di wilayah kerja

Kondisi sosial suatu wilayah menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan program kegiatan, termasuk juga program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. pelaksanaan suatu program akan memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial yang menjadi objek program tersebut.



Perbedaan signifikan dalam kondisi sosial termasuk akses dan kualitas hidup, terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk antar kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM Bandung. Hal ini dapat menyebabkan mengurangi efektivitas pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, terutama dalam hal penguatan kesadaran masyarakat, dan penggunaan sistem informasi yang masih rendah. Beberapa ketimpangan yang terjadi adalah sebagai berikut:

a. Ketimpangan urban dan rural

Ketimpangan antara wilayah perkotaan (urban) dan pedesaan (rural) merupakan fenomena kompleks yang mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Secara umum, wilayah perkotaan cenderung memiliki akses lebih baik terhadap berbagai layanan dan peluang, sementara wilayah pedesaan seringkali tertinggal dalam hal pembangunan dan kemajuan.

b. Ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. IPM menjadi salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan daerah serta menentukan arah kebijakan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat tahun 2024 mencapai 74.92. Pada level provinsi, IPM di Jawa Barat berada dalam kategori tinggi, meskipun demikian masih terlihat adanya ketimpangan pembangunan pada wilayah-wilayah di Jawa Barat. Posisi IPM yang sangat berbeda terlihat dari Kota Bandung yang memiliki capaian IPM tertinggi dengan nilai 83.75 sementara kabupaten Cianjur memiliki IPM terendah sebesar 68.89.

c. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan perekonomian di kabupaten/kota menjadi langkah strategis untuk terus mengejar ketertinggalan dan memperkuat pembangunan manusia secara merata. Ketimpangan literasi digital antar daerah



Ketimpangan literasi digital di Jawa Barat antar kabupaten/kota memang terlihat nyata. Beberapa daerah, seperti Kota Bandung, memiliki tingkat literasi digital yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, seperti di pedesaan. Hal ini dipicu oleh faktor-faktor seperti akses teknologi, infrastruktur, dan tingkat pendidikan. Banyak desa yang belum memiliki jaringan internet yang memadai, sehingga masyarakatnya kesulitan mengakses informasi dan layanan daring. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang cakap dalam pemanfaatan TIK juga menjadi kendala tersendiri. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Program Desa Digital Jawa Barat merupakan inisiatif ambisius pemerintah provinsi untuk membawa transformasi digital ke pelosok desa. Program ini bertujuan untuk mempersempit kesenjangan digital antara perkotaan dan pedesaan, sekaligus memberdayakan masyarakat desa agar mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan di media online dan media sosial

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (society 5.0) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam

melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan.

Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapanpun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap platform e-commerce berlomba lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari.



Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hal ini dikarenakan sistem user generated content (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform e-commerce. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Ancaman kejahatan siber dalam konteks perdagangan obat dan makanan ilegal secara daring membawa tantangan besar bagi BPOM dalam upaya menjaga keamanan produk obat dan makanan yang beredar luas di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan pun tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga harus dilakukan terhadap produk-produk impor yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini kiranya menjadi isu yang penting karena proses identifikasi terhadap produk obat dan makanan ilegal harus dilakukan dengan tepat dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut juga harus diperkuat. Jika tidak ditangani dengan benar, maka bukan tidak mungkin bahwa risiko kesehatan masyarakat akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui ecommerce.

Kemudahan akses informasi dan pembelian produk secara online ini ditunjang juga dengan infrastruktur jalur distribusi barang yang sudah



mencapai pelosok daerah di Jawa Barat. sehingga risiko peredaran produk ilegal dan kejahatan siber ini dapat menjangkau seluruh wilayah Jawa Barat, sampai ke pelosok-pelosok Desa.

Dengan demikian, BBPOM di Bandung dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif serta menegaskan kebutuhan akan pendekatan yang dinamis dan inovatif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan di era digital.

4. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang masih kurang
Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap keamanan dan mutu produk farmasi dan pangan menjadi hambatan besar bagi BBPOM di Bandung dalam menjalankan perannya sebagai pengawas. Hal ini dapat menjadi ancaman terhadap peran dan fungsi BBPOM di Bandung.
 - a. Melemahkan Efektivitas Pengawasan Post-market, karena produk ilegal bisa beredar luas tanpa pengaduan dari masyarakat. Sulit bagi BBPOM Bandung untuk menjangkau semua wilayah, apalagi tanpa laporan masyarakat yang sadar risiko.
 - b. Membuka peluang peredaran produk berbahaya, karena jika permintaan masyarakat terhadap produk murah tanpa peduli mutu tinggi, produsen yang tidak mematuhi aturan akan terus memproduksi. Hal ini membuat pengawasan menjadi reaktif, bukan preventif.
 - c. Meningkatkan beban kasus kesehatan masyarakat, karena berbagai produk obat dan makanan yang berbahaya dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini justru meningkatkan beban pengawasan dan penindakan BPOM.
5. Meningkatnya peredaran informasi dan promosi produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak benar dan menyesatkan



Meningkatnya peredaran informasi dan promosi produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak benar dan menyesatkan menimbulkan berbagai ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, kepercayaan publik, serta stabilitas sektor kesehatan dan pangan.

Informasi palsu bisa membuat masyarakat mengonsumsi produk yang mengandung zat berbahaya, tidak sesuai dosis, atau tidak memiliki khasiat yang dijanjikan. Promosi yang menyesatkan dapat menyebabkan masyarakat mengandalkan produk yang tidak efektif, mengabaikan pengobatan medis yang sebenarnya dibutuhkan. Hal ini bisa memperburuk kondisi penyakit atau menimbulkan komplikasi. Dalam era digital, informasi hoaks menyebar sangat cepat, terutama melalui media sosial dan e-commerce, memperbesar dampak negatifnya terhadap kelompok rentan seperti lansia atau masyarakat berpendidikan rendah.

Dengan adanya informasi yang tidak benar dan menyesatkan juga bisa menimbulkan kerugian terhadap produk-produk resmi yang sudah melalui uji keamanan dan efektivitas dan mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BBPOM di Bandung terkait pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan.

6. Krisis kesehatan global terutama terkait emerging disease

Krisis kesehatan global, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam

konteks analisis SWOT. Krisis semacam ini tidak hanya menguji kapasitas BPOM dalam mengelola risiko terhadap kesehatan masyarakat tetapi juga memerlukan lembaga ini untuk bertindak dengan respons yang cepat dan efektif menghadapi kondisi yang berubah dengan cepat. Dalam situasi pandemi, misalnya, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengawasi dan menyetujui obat-obatan serta vaksin baru dengan proses yang lebih cepat dari biasanya, tanpa mengorbankan standar keamanan dan efikasi yang ketat. Hal ini menuntut BPOM untuk memiliki sistem yang fleksibel dan adaptif, serta kemampuan untuk mengalokasikan



sumber daya dengan efisien untuk mengatasi prioritas yang berubah-ubah.

Selain itu, krisis kesehatan global dapat meningkatkan risiko terhadap distribusi dan akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, memaksa BPOM untuk mengatasi tantangan logistik dan pemantauan pasar yang lebih kompleks. Misalnya, peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau alat kesehatan dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan, atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Krisis seperti ini juga menuntut BPOM untuk meningkatkan komunikasi publiknya, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat untuk mencegah kepanikan dan menginformasikan tentang langkah-langkah keamanan yang tepat. Menghadapi krisis kesehatan global memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya di dalam organisasi tetapi juga dengan lembaga kesehatan lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk memastikan respons yang komprehensif dan terpadu. Krisis kesehatan global menyoroti pentingnya kemampuan BPOM untuk beradaptasi dengan situasi darurat, menjadikannya salah satu ancaman utama yang harus dikelola dalam strategi lembaga

7. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan, farmasi dan pangan olahan yang cepat

Perkembangan teknologi yang cepat di bidang kesehatan, farmasi, dan pangan olahan membawa banyak manfaat namun juga menimbulkan ancaman dan tantangan yang signifikan terhadap kinerja pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat. Beberapa ancaman yang berasal dari perkembangan ilmu dan teknologi, sebagai berikut:

a. Keterbatasan Kapasitas Pengawasan Teknologi Baru

Teknologi seperti nanoteknologi, bioengineering, dan produk berbasis AI di bidang kesehatan dan farmasi berkembang lebih cepat daripada regulasi dan standar pengawasan sehingga BBPOM di Bandung



berpotensi kesulitan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengontrol produk baru karena keterbatasan sumber daya manusia, teknologi deteksi, dan peraturan yang belum mengikuti perkembangan.

b. Munculnya Produk Baru yang Belum Terstandar

Inovasi produk pangan olahan baik yang berbasis plant-based, genetically modified organisms (GMO), dan suplementasi berbasis bioteknologi menimbulkan tantangan dalam penetapan standar keamanan dan kelayakan konsumsi. Produk-produk ini bisa masuk ke pasar tanpa izin edar resmi, menyulitkan pengawasan BBPOM di Bandung yang akan berdampak kepada peredaran produk yang tidak aman di masyarakat.

c. Peredaran Produk Melalui E-commerce dan Platform Digital

Penjualan obat, suplemen, dan pangan olahan secara daring semakin meningkat, termasuk dari luar negeri, seringkali tanpa pengawasan yang memadai menghadapi kendala dalam tracking dan penindakan terhadap produk ilegal atau palsu di ranah digital serta Banyak masyarakat belum memahami perbedaan antara produk yang terdaftar resmi dan yang tidak, terutama jika membeli lewat media sosial atau e-commerce. Ini menyebabkan ketergantungan pada produk viral tanpa bukti keamanan atau efektivitas.

d. Kebutuhan Adaptasi Teknologi Internal

Untuk bisa mengikuti perkembangan, BBPOM di Bandung perlu mengadopsi teknologi baru (AI untuk deteksi pelanggaran, blockchain untuk pelacakan distribusi, dsb). Investasi ini membutuhkan biaya besar dan pelatihan SDM yang tidak bisa dilakukan secara instan.

e. Tingginya Ekspektasi terhadap Kecepatan Pelayanan

Teknologi membuat masyarakat terbiasa dengan layanan instan. Keterbatasan BBPOM di Bandung dalam memberikan respon cepat terhadap permohonan izin, pengujian produk, dan pengaduan publik bisa dianggap sebagai penurunan kualitas layanan.



8. Kurangnya peran lintas sektor terkait dalam pengawasan yang menjadi kewenangannya

Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan memiliki spektrum yang luas melibatkan banyak instansi, yang masing-masing memiliki kewenangannya sesuai yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. sebagaimana Undang-Undang nomor: 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan juga diemban oleh Pemerintah Daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, diperlukan peran serta semua pihak yang memiliki kewenangan, termasuk pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Kurangnya peran lintas sektor terkait dalam pengawasan yang menjadi kewenangannya adalah salah satu tantangan utama dalam memastikan keamanan dan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi oleh BBPOM di Bandung. Ketiadaan koordinasi yang jelas dan tidak adanya sinergi yang baik antar lintas sektor menyebabkan pelaksanaan pengawasan menjadi tidak efektif dan respon perbaikan bisa terhambat.

TABEL 1.5

MATRIKS RINGKASAN ANALISIS SWOT

Strengths	Weakness
1. Transformasi Birokrasi menjadi Pemerintahan yang tangkas (agile governance)	1. Kapasitas kelembagaan BPOM yang belum optimal
2. Komitmen Kepemimpinan yang kuat	2. Jumlah dan distribusi SDM yang belum memadai
3. Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia yang memadai	3. Sistem Teknologi Informasi yang belum terintegrasi dan tidak optimal
4. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi	4. Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

5. Laboratorium tersertifikasi ISO 9001:2015 dan terakreditasi ISO IEC 17025:2017	5. Layanan Perizinan
6. Sarana pelayanan publik	
Oportunities	Threats
1. Kondisi perekonomian wilayah kerja yang berkembang pesat	1. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan dan ketentuan di bidang Obat dan Makanan yang masih rendah
2. Kondisi sosial wilayah kerja yang berkembang	2. Terdapat ketimpangan sosial yang cukup tinggi antar daerah kabupaten / kota di wilayah kerja
3. Kerjasama dengan stakeholder telah terjalin dengan baik	3. Peningkatan peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan di media online dan media sosial
4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan	4. Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang masih kurang
5. Penerapan Teknologi Informasi dan digitalisasi	5. Meningkatnya peredaran informasi dan promosi produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak benar dan menyesatkan
6. Kepercayaan masyarakat terhadap BBPOM di Bandung	6. Krisis kesehatan global terutama terkait emerging disease
7. Kebijakan suprasistem terkait sediaan farmasi dan pangan olahan	7. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan, farmasi dan pangan olahan yang cepat
8. Penguatan isu kesehatan global	



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

- | | |
|--|--|
| | 8. Kurangnya peran lintas sektor terkait dalam pengawasan yang menjadi kewenangannya |
|--|--|



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG

2.1. Visi

BBPOM di Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Jawa Barat. Sebagai salah satu UPT BPOM, BBPOM di Bandung dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan Misi Presiden terpilih (Asta Cita Presiden).

Misi BPOM periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik



secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. BBPOM di Bandung sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM periode 2025-2029 tersebut..

2.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi



pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. BBPOM di Bandung sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM tersebut.

Berbagai tujuan BPOM tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

TABEL 2.1

TARGET INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN TUJUAN

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan	Persentase Sediaan Farmasi dan	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu					
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional,	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima						

2.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai BBPOM di Bandung, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan BBPOM di Bandung akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.

Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:



- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat



kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- Jumlah desa pangan aman
- Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam



memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.



SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Tabel 2.2

Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator BBPOM di Bandung periode 2025-2029

Visi :

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> 2. <i>Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> 3. <i>Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> 4. <i>Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. <i>Indeks Kepatuhan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> 1. <i>Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 2. <i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> 3. <i>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. <i>Persentase sampel KLB keracunan</i>



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		<i>Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	<i>pangan yang diuji sesuai standar</i> 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase keputusan/reko mendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	<i>Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu</i> <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> 1. <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> 2. <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> 3. <i>Jumlah desa pangan aman</i> 4. <i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang	Terwujudnya Organisasi yang	Terwujudnya Birokrasi yang	Layanan Publik UPT yang prima



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima <i>Indikator: Indeks RB BPOM</i>	<i>Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT</i>
			Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal <i>Indikator:</i> 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran kegiatan BBPOM di Bandung 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BPOM untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis BPOM sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3.



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Tabel 2.3

Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan dalam cara produksi atau distribusi yang baik	1. Peningkatan bimbingan teknis cara produksi atau distribusi yang baik 2. Pemberian sanksi administratif sesuai pedoman tindak lanjutnya	Poksi Inspeksi
	Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan (termasuk sampel PIRT dan MBG) yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan pedoman yang berlaku	1. Menyusun renlak pengambilan sampel dan pengujian yang sesuai dengan pedoman sampling, target dan sumber daya yang tersedia. 2. Meningkatkan koordinasi antara pengambil sampel dan penguji sampel, agar sampel yang diambil dapat diuji sesuai ketentuan	Poksi Inspeksi Poksi Pengujian
	Rendahnya tingkat kesadaran sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Meningkatkan Monev pelaporan dan koordinasi dengan sarana pelayanan kesehatan target	Poksi Inspeksi
	Pelaku usaha tidak menindaklanjuti rekomendasi / tindak lanjut perbaikan hasil pengawasan	Pendampingan pelaku usaha dalam melakukan perbaikan sesuai rekomendasi Memberikan sanksi	Poksi Inspeksi



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
	BBPOM di Bandung	administratif yang lebih berat sesuai pedoman tindak lanjut	
	Praktik pendistribusian dan penyerahan Obat Antibiotik yang tidak sesuai ketentuan	1. Meningkatkan pengawasan pendistribusian Obat Antibiotik di jalur distributor dan sarana pelayanan kefarmasian 2. Advokasi dan kolaborasi lintas sektor 3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan bahaya AMR	Poksi Inspeksi (1,2) Poksi Infokom (2,3)
	Kurangnya pemenuhan standar peralatan instrumen laboratorium sesuai ketentuan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL)	1. Mengoptimalkan sistem regionalisasi laboratorium 2. Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan peralatan sesuai SKL	Poksi Pengujian
	Kurangnya respon Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota Pangan Aman	Meningkatkan advokasi dan koordinasi kepada pimpinan daerah dan jajarannya	Poksi Infokom
SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Pemeriksaan sarana produksi Pangan Fortifikasi tidak dapat dilaksanakan	Melakukan update data profil sarana produksi pangan fortifikasi secara rutin	Poksi Inspeksi
SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE	Masyarakat peserta KIE tidak dapat	Menyusun materi KIE yang	Poksi infokom



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah dipublikasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
	memahami materi/informasi yang disampaikan	menyesuaikan dengan kondisi dan tingkat pemahaman masyarakat setempat	
	Tidak dapat melaksanakan semua tahapan Kegiatan pemberdayaan masyarakat	1. Peningkatan advokasi dan koordinasi dengan pimpinan daerah dan jajarannya. 2. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pendampingan dan pengawalan	Poksi Infokom
SK 4: Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Pelaku usaha yang didampingi dan difasilitasi, tidak dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan pendampingan	1. Membuat kriteria penetapan target pelaku usaha yang didampingi sesuai pedoman 2. Intensifikasi pendampingan dan monev pelaksanaannya	Poksi Sertifikasi
SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Penyusunan administrasi penyidikan secara lengkap dan sesuai ketentuan 2. Peningkatan koordinasi dengan Integrated Criminal Justice System (ICJS) dalam penyelesaian berkas perkara 3. Peningkatan	Poksi Penindakan



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		kompetensi PPNS BBPOM di Bandung	
	Masih maraknya tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang diedarkan secara daring	1. Melakukan perkuatan infrastruktur yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal secara daring 2. Peningkatan kompetensi petugas patroli siber	Poksi Penindakan
SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.	1. Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber 2. Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Poksi Penindakan
SK 7: Layanan Publik UPT yang prima	Nilai survey kepuasan masyarakat tidak maksimal	1. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan sesuai standar layanan yang ditetapkan, termasuk dalam melayani pelanggan	Poksi Infokom



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		difabel 2. Pembuatan form survey yang mudah dipahami dan diisi oleh responden di berbagai media	
SK 8: Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Penurunan nilai pembangunan ZI BBPOM di Bandung	1. Melaksanakan awareness pelaksanaan reformasi birokrasi untuk seluruh pegawai 2. Membuat Rencana Aksi pelaksanaan pembangunan ZI di BBPOM di Bandung 3. Meningkatkan peran agent of change (AoC)	Bagian Tata Usaha
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Terintegrasi (SPIPT) belum diimplementasikan secara optimal	1. Peningkatan implementasi sistem manajemen kinerja 2. Peningkatan implementasi sistem manajemen risiko 3. Implementasi sistem manajemen mutu terintegrasi pengawasan Obat dan Makanan	Bagian Tata Usaha



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM Renstra 2025 - 2029

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat didalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1

Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas	Penguatan pengelolaan SDM dan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Bandung Renstra 2025 - 2029

BBPOM di Bandung sebagai salah satu UPT BPOM di wilayah Jawa Barat mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM 2025-2029. Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Arah kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029 adalah sebagai Berikut :

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis:
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM:
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Bandung 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan efektifitas dan cakupan pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang komprehensif berdasarkan kajian risiko, termasuk penguatan farmakovigilans.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha, terutama pelaku UMKM, untuk mendorong daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan, dengan menguatkan kolaborasi lintas sektor terkait.
4. Meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga dapat mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor dan semua pemangku kepentingan diwilayah kerja.
6. Memperkuat pengujian laboratorium, dan implementasi TIK yang modern, terintegrasi dan relevan
7. Memperkuat pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur kantor dan laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
8. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandung, termasuk meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Tabel 3.2

Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Bandung 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Meningkatkan efektifitas dan cakupan pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang komprehensif berdasarkan kajian risiko, termasuk penguatan farmakovigilans
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM:	Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha, terutama pelaku UMKM, untuk mendorong daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan, dengan menguatkan kolaborasi lintas sektor terkait.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatkan efektifitas komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat,



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	sehingga dapat mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor dan semua pemangku kepentingan di wilayah kerja
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Memperkuat pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur kantor dan laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran Memperkuat pengujian laboratorium, dan implementasi TIK yang modern, terintegrasi dan relevan
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandung, termasuk meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi BBPOM di Bandung ini, dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Adapun untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi tersebut, BBPOM di Bandung melaksanakan Program Prioritas berupa Program Pengawasan Obat dan Makanan, dengan Kegiatan Prioritas sebagaimana yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM. Rincian kegiatan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pemeriksaan sarana Produksi sediaan farmasi dan pangan olahan secara rutin dilakukan untuk memantau dan memastikan pemenuhan persyaratan terhadap standar yang ditentukan. Sehingga Pemeriksaan sarana produksi meliputi:

- a. Pemeriksaan sarana produksi obat
- b. Pemeriksaan sarana produksi obat bahan alam
- c. pemeriksaan sarana produksi suplemen kesehatan
- d. Pemeriksaan sarana produksi kosmetik
- e. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan :
 - o Sarana produksi pangan olahan
 - o Sarana produksi pangan fortifikasi
 - o Sarana produksi pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)



2) Pemeriksaan Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan

Olahan

Pemeriksaan sarana distribusi produk sediaan farmasi dan pangan olahan dilaksanakan secara rutin di sepanjang rantai pasok jalur distribusi mulai dari produsen sampai ke konsumen. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang sampai ke tangan produsen, masih tetap memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat.

Pemeriksaan sarana distribusi, meliputi :

- a. Pemeriksaan sarana distribusi obat :
 - o PBF
 - o Pelayanan Kefarmasian
- b. Pemeriksaan sarana distribusi obat bahan alam
- c. Pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan
- d. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik
- e. Pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan

3) Peningkatan Pelayanan Publik

- a. Pemberian Informasi Obat dan Makanan
- b. Sertifikasi sarana Produksi Obat dan Makanan
- c. Sertifikasi sarana Distribusi Obat
- d. Penerimaan layanan pengaduan masyarakat
- e. Penyelenggaraan pelayanan informasi publik
- f. Pengujian produk Obat dan Makanan dari pihak ke-3

4) Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan

- a. KIE secara langsung (luring n online)
- b. KIE secara tidak langsung (penyebaran informasi, ILM)
- c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui SAKA POM

5) Pemberdayaan Komunitas Sekolah, Desa dan Pasar

Pemberdayaan komunitas Sekolah, Desa dan Pasar merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan, khususnya di lingkungan Sekolah, Desa dan Pasar.



Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) yang aman.

Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) merupakan produk yang harus dijaga kualitasnya karena makanan yang dikonsumsi oleh anak sekolah akan mempengaruhi kesehatannya. Manusia yang sehat merupakan aset bangsa yang berharga karena merupakan penerus bangsa yang harus menjadi manusia yang unggul melalui asupan makanan yang berkualitas baik dan bergizi.

Desa Pangan Aman

Pemahaman bahwa masyarakat harus menggunakan Obat dan Makanan yang berkualitas perlu tersampaikan ke tingkat individu di desa

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Pasar adalah sumber bagi masyarakat untuk membeli kebutuhan pangan sehari-harinya maupun pembelian bahan baku bagi usaha pangannya sehingga pasar yang aman dari bahan berbahaya merupakan garda terdepan dalam penyaringan dan pengendalian peredaran bahan pangan atau pangan yang mengandung bahan berbahaya

6) Pengawasan Produk sediaan farmasi dan pangan olahan

- a. Pengawasan produk obat
- b. Pengawasan produk Obat Tradisional
- c. Pengawasan produk suplemen kesehatan
- d. Pengawasan produk kosmetik
- e. Pengawasan produk pangan olahan
- f. Pengawasan produk PIRT
- g. Peningkatan efektifitas penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan



7) Pengujian Obat dan Makanan

- a. Pemenuhan standar Good Laboratory Practice (GLP), yang merupakan pedoman yang mengatur tata cara kerja di laboratorium untuk menjamin kualitas data dan hasil pengujian
- b. Meningkatkan standar ruang lingkup akreditasi laboratorium serta Jaminan Mutu Hasil Pengujian (JMHP) terhadap seluruh sampel yang diuji termasuk seluruh obat publik yang ada di e-catalog untuk mendukung Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

8) Pemberantasan Kejahatan bidang Obat dan Makanan

- a. Pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
 - Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan
 - Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan
 - Penggalangan stakeholder dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan
- b. Intelijen Obat dan Makanan Operasi intelijen
- c. Pelaksanaan operasi Siber dalam rangka pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui media daring
- d. Penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan

9) Pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar dan mutu

Kegiatan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar dan mutu bertujuan untuk membantu dan mendorong Pelaku usaha UMKM dapat memenuhi persyaratan standar dan mutu yang telah ditetapkan. Kegiatan meliputi kegiatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha, kegiatan audit pemeriksaan pemenuhan persyaratan standar dan mutu, kegiatan pendampingan perbaikan atas temuan audit, dan peningkatan kesadaran dan kepatuhan Pelaku Usaha secara konsisten.



10) Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, inovasi teknologi, serta perubahan pola konsumsi, pengawasan obat dan makanan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas yang strategis yang tidak dapat dilakukan sendiri tetapi bersifat multisektor. Kerja sama lintas sektor dan antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan bahwa standar keamanan dan kualitas tetap tinggi, serta responsif terhadap dinamika dan risiko baru yang muncul. Dalam pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan diperlukan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait.

Kerja sama dalam pengawasan obat dan makanan hingga tahun 2029 sangat penting untuk memastikan bahwa sistem pengawasan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan sinergi antara berbagai pihak, BPOM dapat memperkuat pengawasan, melindungi kesehatan masyarakat, dan beradaptasi dengan perubahan global dan teknologi. Pendekatan ini tidak hanya menjamin keamanan produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

2. Kegiatan Dukungan Manajemen

Kegiatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah unit organisasi yang optimal, adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan zona integritas Badan POM menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Menciptakan kinerja organisasi yang bebas dari korupsi merupakan dampak sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan *island of integrity* yang diharapkan dapat menciptakan sumber daya organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi. Dampak lainnya adalah



efisiensi yang lebih besar karena organisasi mampu menciptakan organisasi yang lebih efisien atau dengan menggunakan sumber daya yang lebih minimal dapat menghasilkan output yang lebih optimal. Dalam upaya mempengaruhi sistem yang lebih luas, unit organisasi yang melaksanakan *island of integrity* diharapkan dapat menularkan virus keberhasilan untuk mempengaruhi sistem organisasi yang lebih luas dan mampu menghasilkan lebih banyak lagi unit organisasi yang memiliki Zona Integritas (ZI).

Langkah maju dari penerapan Zona Integritas adalah program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kedua program ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. WBK adalah level *advanced* dari penerapan ZI. Sedangkan WBBM merupakan level lanjutan dengan standar yang lebih tinggi daripada WBK. Kedua program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Melalui program-program ini, diharapkan bahwa masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari pelayanan publik yang lebih baik dan birokrasi yang lebih melayani.

Penerapan Zona Integritas berperan sebagai alat yang ampuh untuk mendorong tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan di Indonesia. Dengan menumbuhkan budaya integritas, akuntabilitas, dan transparansi, ZI berkontribusi pada pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berpusat pada warga negara.

2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia

- a. Implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan baik seperti penyusunan pedoman, sosialisasi, implementasi, monitoring dan evaluasi sistem kerja baru dan *flexible working arrangement*.



- b. Peningkatan kepatuhan terhadap sistem merit dalam sistem manajemen ASN dimana adanya transformasi perencanaan kebutuhan ASN, implementasi reformasi manajemen kinerja ASN, reformasi pengelolaan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan disiplin ASN serta perkuatan digitalisasi manajemen ASN.
- c. Implementasi pola karier SDM dan monitoring serta evaluasi
- d. Pengembangan SDM POM dilaksanakan dengan meningkatkan kompetensi teknis dan manajemen sosial kultur, yang dilaksanakan secara terencana sesuai dengan grand design pengembangan SDM POM yang telah dibuat

3) Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Untuk menjamin keberlangsungan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang optimal, BBPOM di Bandung perlu memastikan ketersediaan, kelayakan, dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui pengelolaan sarana dan prasarana yang terencana, terimplementasi, dan termonitoring secara baik.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung, bertujuan untuk mendukung agenda Transformasi Tata Kelola sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029, melalui kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar yang diwujudkan melalui:
 - Pengadaan sarana prasarana yang memanfaatkan energi ramah dalam menghadapi globalisasi;
 - Penyusunan roadmap pemenuhan sarana prasarana bagi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan standar sarana prasarana kantor di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

- Kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui permintaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan ahli konstruksi.
- b. Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa yang Sesuai dengan Prinsip Pengadaan sebagai Wujud Kontribusi terhadap Agenda Pemulihan Ekonomi Nasional yang diwujudkan melalui:
 - Pemanfaatan Produk Dalam Negeri, serta Penyelenggaraan Perdagangan melalui Sistem Elektronik untuk perdagangan barang dan jasa di lingkungan BPOM, dan;
 - Penambahan Katalog Sektorial Etalase Konsolidasi Reagen secara nasional.
 - Peningkatan Kualitas Manajemen Aset BPOM, serta Optimalisasi Pengelolaan Sarana Prasarana yang diwujudkan melalui:
 - Digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara melalui Aplikasi Elektronik Barang Milik Negara (E-BMN) yang terkoneksi dengan aplikasi Badan POM dan eksternal dan;
 - Inventarisasi rutin barang milik negara yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk meminimalisir Barang Tidak Ditemukan dan membentuk tim khusus untuk menelusuri barang NUP dengan berkoordinasi dengan pihak APIP

4) Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

BBPOM di Bandung sebagai instansi pemerintahan tentunya mendukung penuh implementasi SPBE, dengan melakukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang meliputi media, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Dalam implementasi SPBE, BBPOM di Bandung telah melakukan digitalisasi pelaksanaan kegiatan melalui beberapa aplikasi yang telah dikembangkan, dan membantu dalam penyelenggaraan layanan publik, pelaksanaan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan,



dan pelaksanaan proses bisnis internal, sehingga lebih cepat, mudah diakses dan akuntabel.

5) Penguatan pengelolaan keuangan

Penguatan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Salah satu wujud pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

6) Penguatan Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi atau instansi. Dalam konteks instansi pemerintah, manajemen risiko menjadi semakin penting mengingat adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk mewujudkan Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai diperlukan adanya peningkatan efektivitas Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu.

Penerapan manajemen risiko dapat membantu BBPOM di Bandung dalam mengelola risiko yang muncul dan menghindari terjadinya



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah didaftarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan BBPOM di Bandung Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, disusunlah matriks kinerja Unit yang akan menjadi sasaran keberhasilan dan bahan evaluasi BBPOM di Bandung dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya.

Matriks ini memuat sasaran kegiatan yang mencerminkan Visi dan Misi BBPOM di Bandung, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian Tujuan BBPOM di Bandung dalam periode Tahun 2025-2029. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih BPOM selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini dijadikan sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Matriks kerangka kinerja BBPOM Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

TABEL 4.1

MATRIKS KERANGKA KINERJA BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2025-2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	90.00	91.25	92.50	93.75
	2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
	3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko	85	87	89	91	93



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.00	85.25	85.50	85.75	86.00
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	90.75	92.50	93.75	95.25
8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	83.00	85.00	87.00	90.00
9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	94.25	95.50	96.75	98.00



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah dipertanggungjawabkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00
	11 Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.68	86.68	88.88	90.88	92.28
	12 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84
	13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
	14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7	85.8	89.5	91.2	92.7
	15 Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.26	10.53	21.05	31.58	63.16
	16 Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	82	83	84



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah dipublikasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	17 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57.00	63.00	68.00	71.00	75.00
Meningkatnya efektivitas KIE	18 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86,94	87,81	88,68	89,55	90,42
	19 Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	17	20	23	24	26
	20 Jumlah desa pangan aman	6	10	10	10	10
	21 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	3	3	5	5
Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	22 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16.45	34.21	53.95	75.66	99.34
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	72	74	76	78	80



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah dipublikasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	24 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
Layanan Publik yang Prima	25 Indeks Pelayanan Publik UPT BPOM	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
Terwujudnya Tatakelola	26 Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,5	91,75	92,0	92,25	92,50
Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	27 Nilai AKIP UPT BPOM	83,10	83,25	83,40	83,55	83,70
	28 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
	29 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.95	3	3.05	3.1	3.15

4.2. Kerangka Pendanaan

- Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan
- sediaan farmasi dan pangan olahan sehingga dapat mencapai target sasaran
- kegiatan dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu didukung oleh anggaran
- yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut :

TABEL 4.2

RENCANA KERANGKA PENDANAAN BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2025-2029 BERDASARKAN KEGIATAN



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah dipublikasikan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	46.635,42	54.767,58	56.736,99	58.474,99	59.809,34
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	19.755,52	21.731,87	23.906,02	26.297,77	28.928,93
TOTAL	66.390,94	76.499,45	80.643,01	84.772,76	88.738,27

TABEL 4.3

RENCANA KERANGKA PENDANAAN BBPOM DI BANDUNG

TAHUN 2025-2029 BERDASARKAN SUMBER DANA

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	63.359,03	73.467,54	77.611,10	81.740,85	85.706,36
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3.031,91	3.031,91	3.031,91	3.031,91	3.031,91
TOTAL	66.390,94	76.499,45	80.643,01	84.772,76	88.738,27

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan BBPOM di Bandung dalam kurun waktu 2025-2029 dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan BBPOM di Bandung yang sudah ditetapkan. Dengan kerangka pendanaan ini, BBPOM di Bandung diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan meningkatkan cakupan pengawasan dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan KIE yang dapat menjangkau masyarakat diseluruh wilayah kerja, guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu



RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BBPOM di Bandung, dengan peningkatan SDM dan sarana prasarana serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan artificial intelijen, guna meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja.



www.bandung.pom.go.id



bpom_bandung@pom.go.id



022-4230546



Jln. Pasteur No 25, Kota Bandung

Dokumen ini telah dipandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis BBPOM di Bandung tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan Renstra BPOM tahun 2025-2029.

Renstra BBPOM di Bandung tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman untuk perencanaan menengah dan tahunan dan dijadikan acuan kerja di lingkungan di BBPOM di Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua kelompok substansi dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja BBPOM di Bandung. Dengan demikian pencapaian hasil pelaksanaan Renstra ini dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Badan POM Tahun 2025-2029.

Kepala Balai Besar POM di Bandung,



Drs, I Made Bagus Gerametta, Apt



LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi				
									(Dalam Juta Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Balai Besar POM di Bandung									66.390,94	76.499,45	80.643,01	84.772,76	88.738,27
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									46.635,42	54.767,58	56.736,99	58.474,99	59.809,34
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT												
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Bandung	88.75	90.00	91.25	92.50	93.75					
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		26	27	28	29	30					
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	87	89	91	93					
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100					
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	87	89	92	95					
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		85.00	85.25	85.50	85.75	86.00					
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		88.75	90.75	92.50	93.75	95.25					
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80.00	83.00	85.00	87.00	90.00					
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93.00	94.25	95.50	96.75	98.00					
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85.00	87.00	89.00	92.00	95.00					
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		84.68	86.68	88.88	90.88	92.28					
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		80	81	82	83	84					
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100					
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		81.7	85.8	89.5	91.2	92.7					

	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		5.26	10.53	21.05	31.58	63.16					
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			81	82	83	84					
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			90	95	100	200	250					
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			745	745	785	785	862					
	RO 3: Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			1766	1781	1873	1970	2075					
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			298	324	349	376	405					
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			995	1072	1134	1203	1276					
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM			204	204	204	216	216					
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia			4	4	4	4	4					
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	1	1	1					
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	1	1	1					
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			0	4204	4204	4204	4204					
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi												
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		57.00	63.00	68.00	71.00	75.00					
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			36	40	43	45	47					
	Meningkatnya efektivitas KIE												
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		86,94	87,81	88,68	89,55	90,42					
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		17	20	23	24	26					
	3	Jumlah desa pangan aman		6	10	10	10	10					
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	3	3	5	5					
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya			75335	75335	75350	75375	75400					
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			27	24	25	27	28					
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			17	20	23	24	26					
	RO 4: Desa Pangan Aman			6	10	10	10	10					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		1	3	3	5	5					
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu											
1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		16.45	34.21	53.95	75.66	99.34					
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		26	27	30	33	36					
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT											
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		72	74	76	78	80					
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		7	8	8	9	9					
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT											
1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94					
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		14	14	15	15	15					
	Layanan Publik UPT yang prima											
1	Indeks Pelayanan Publik UPT		4,7	4,75	4,8	4,85	4,9					
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		1310	1589	1637	1690	1749					
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal											
1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		91,5	91,75	92	92,25	92,5					
2	Nilai AKIP UPT BPOM		83,1	83,25	83,4	83,55	83,7					
3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5					
4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		2.95	3	3.05	3.1	3.15					
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		1	1	1	1	1					
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		1	1	1	1	1					
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		12	24	48	72	108					
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								19.755,52	21.731,87	23.906,02	26.297,77	28.928,93
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1					
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	1	1	1					